

**KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN
ENREKANG**

SKRIPSI

Oleh

**SRI ASTUTI DARMAN
4513042060**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2018**

**KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Teknik (ST)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh

**SRI ASTUTI DARMAN
4513042060**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

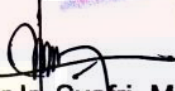
SRI ASTUTI DARMAN
4513042060

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 24 Januari 2018

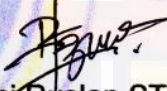
Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. Ir. Syafri, M. Si

NIDN 0905076804


Pembimbing II,


Rusneni Ruslan, ST, M. Si


NIDN 0915038602

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Teknik


Dr. Hamsma, ST, M. Si
NIDN 09-240676-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Jufriadi, ST, M&P
NIDN 09-310168-02



HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa, Nomor : A.026/ FT/ UNIBOS/ XI/ 2018 pada tanggal 19 Januari 2018 tentang PANITIA dan PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, maka:

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Januari 2018
Skripsi Atas Nama : Sri Astuti Darman
Nomor Pokok : 4513042060

Telah diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Bosowa setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana dan untuk memenuhi Salah satu syarat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa.

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua : Dra. Umi Salamah, MSTR

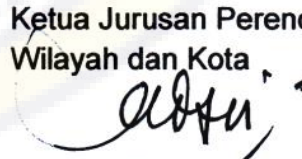
Sekretaris : Ilham Yahya, ST, MSP

Anggota : 1. Dr.Ir. Syafri, M.Si

2. Rusneni Ruslan, ST, M.Si

Mengetahui,


Dekan Fakultas Teknik
UNIVERSITAS
BOSOWA
Dr. Hamsina, ST, M. Si
NIDN 09-240676-01


Ketua Jurusan Perencanaan
Wilayah dan Kota
Jufriadi, ST, M, MSp
NIDN 09-310168-02

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Sri Astuti Darman
Nim : 45 13 042 060
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2018

Yang menyatakan,

Sri Astuti Darman

ABSTRAK

Sri Astuti Darman, 2018 "*KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN ENREKANG*". Dibimbing oleh Bapak Syafri selaku Pembimbing I Dan Ibu Rusneni Ruslan selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi mana yang paling Potensial sebagai sektor unggulan dan dapat berkontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang. Untuk menganalisis kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Enrekang dalam pertumbuhan ekonominya.

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu metode analisis Shif share untuk menentukan sektor unggulan dalam menunjang perekonomian di Kabupeten Enrekang dan untuk menentukan seberapa besar kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian Kabupaten Enrekang, sedangkan metode analisis LQ (Location Quotient) digunakan untuk menentukan basis sektor/komoditi yang dapat di ekspor ataupun hanya untuk mencukupi daerah itu sendiri.

Kata kunci : sektor unggulan, kontribusi sektor ekonomi

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Hamsina, ST, M.Si. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar beserta Bapak Jufriadi, ST, MSP selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. Syafri, M.Si selaku pembimbing I serta Ibu Rusneni Ruslan, ST, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta pengetahuannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Pihak instansi pemerintah yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Secara khusus dan tulus kepada kedua orangtuaku Ibunda Asma Firdaus dan Ayahanda Darman Sawedi S.Pd yang sangat luar biasa dan sangat saya banggakan dalam membesarkan dan mendidik penulis serta kepada Kakak Dan Adik Yang di sayangi. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang tulus sedalam-dalamnya kepada segenap keluarga di Kab. Enrekang yang begitu luar biasa membantu dan memberi nasehat-nasehat, dan kepada Kakanda Fardis M Nur penulis ucapkan banyak terima kasih karna sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih untuk Kawan - kawan seperjuangan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar, tekhhusus angkatan 2013(GPS), Dan Kawan – Kawan angkatan 2013 Se-Fakultas TEKNIK

7. Bapak & Ibu Staf pengajar serta karyawan(i) Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota, atas segala bimbingan, didikan dan bantuan selama penulis menuntut ilmu dibangku perkuliahan.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalasnya dengan yang lebih baik.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 24 Januari 2018



UNIVERSITAS
BOSOWA
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pengembangan Wilayah.....	9
B. Pertumbuhan Wilayah	10
C. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	16
D. Pembangunan Ekonomi	20
E. Model Pembangunan Ekonomi Wilayah.....	23
F. Strategi Pembangunan ekonomi Wilayah.....	25
G. Pengertian Sektor Unggulan.....	26
H. Sektor-Sektor Strategis.....	26
I. Teori Tempat Sentral.....	28
J. Pengembangan Sektor Potensial.....	29
K. Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral.....	30

L. Teori Interaksi Spasial.....	31
M. Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Daerah	32
N. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB)	34
O. Kerangka pikir	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Variabel Penelitian.....	40
E. Metode Analisis	40
1. analisis LQ	40
2. analisis shift share.....	42
F. Defenisi Operasional.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Wilayah.....	46
1. gambaran umum Sulawesi Selatan	46
a. letak geografi.....	46
b. topografi	48
c. jumlah kabupaten/kota	48
d. jumlah dan kepadatan penduduk.....	49
2. Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang	49
1. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang.....	49
a. Visi	49
b. Misi	51
3. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang	54
a. letak geografi	54
b. topografi.....	57
c. kondisi iklim dan curah hujan	59
d. hidrologi	60

e. penggunaan lahan	62
f. jumlah penduduk.....	64
g. mata Pencaharian penduduk	65
h. potensi sumber daya alam	65
i. data PDRB Sul-Sel dan Kabupaten Enrekang atas dasar harga konstan tahun 2015-2016	75
4. Kecenderungan Pertumbuhan sektor Kegiatan	77
1. pertumbuhan PDRB.....	77
2. analisis pergeseran PDRB	79
3. analisis Shift Share	82
4. analisis penentuan sektor unggulan	83
5. Pergeseran Net Shift.....	87
4. analisis penentuan sektor-sektor strategis	89
a. kontribusi terhadap PDRB Kabupaten	89
b. penyediaan lapangan kerja	91
c. berpengaruh terhadap perkembangan sektor lain .	92
d. sektor yang potensial meningkatkan ekspor	93
7. faktor yang mendukung sektor unggulan.....	96
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

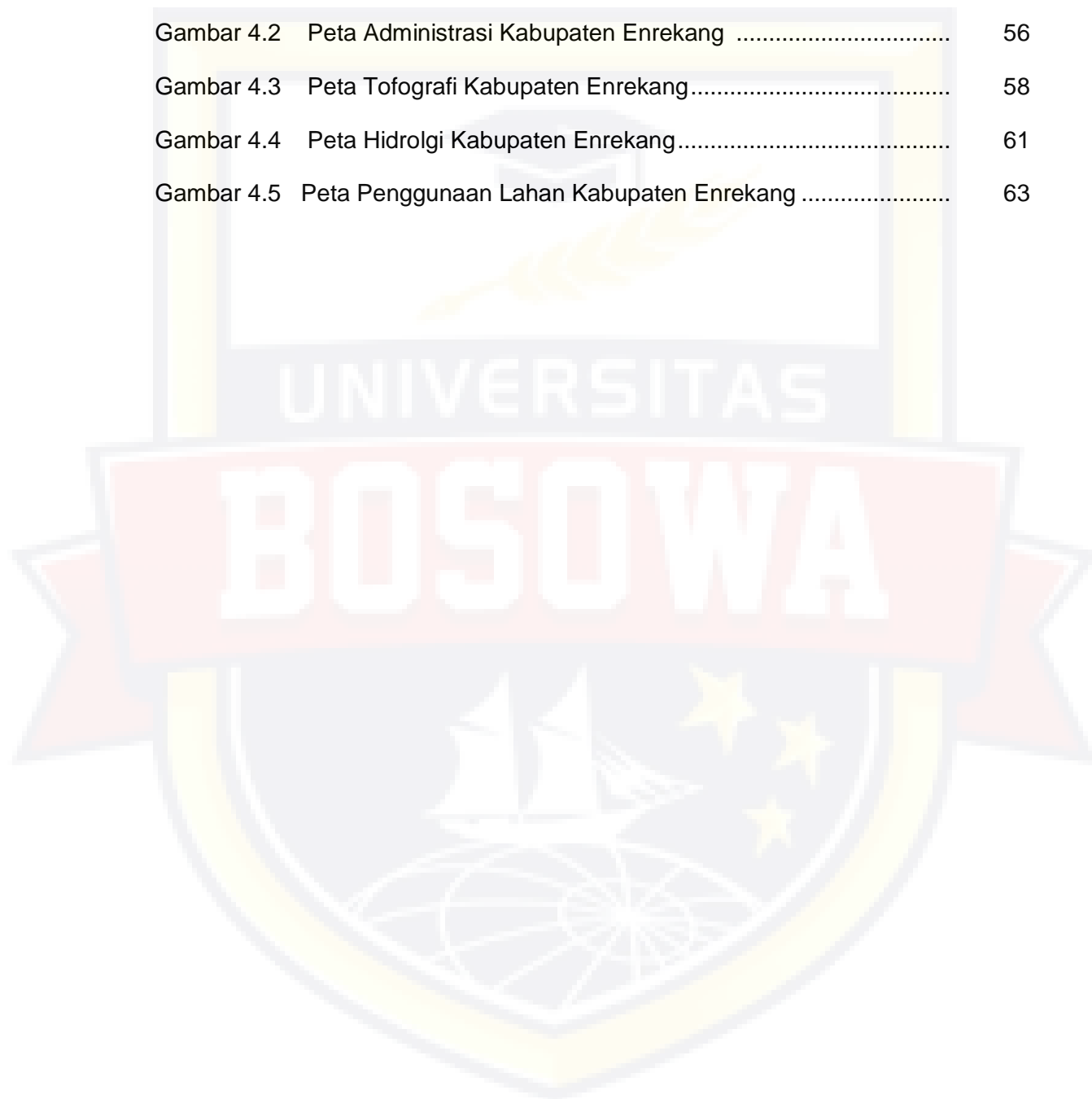
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah dirinci Berdasarkan Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Enrekang Tahun 2016	55
Tabel 4.2	keadaan wilayah Kabupaten Enrekang menurut tingkat keterengangan tahun 2016	57
Tabel 4.3	jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Enrekang tahun 2016	59
Tabel 4.4	penggunaan lahan Kabupaten Enrekang tahun 2016.....	62
Tabel 4.5	jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016	64
Tabel 4.6	jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kabupaten Enrekang tahun 2016	65
Tabel 4.7	jumlah produksi Tanaman Pangan dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2016	67
Tabel 4.8	jumlah produksi Sayuran dirinci menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang tahun 2016.....	69
Tabel 4.9	Jumlah produksi Perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2016.....	70
Tabel 4.10	Populasi ternak menurut kecamatan dan jenis ternak di kabupaten Enrekang tahun 2017	71
Tabel 4.11	Populasi unggas menurut Kecamatan dan jenis unggas di Kabupaten Enrekang tahun 2016.....	72
Tabel 4.12	Produksi Subsektor Perikanan Darat menurut Jenis Ikan per Kecamatan di Kabupaten Enrekang (Ton), 2016.....	73

Tabel 4.13	Luas kawasan hutan menurut kecamatan di kabuten Enrekang (hektar) 2016	74
Tabel 4.14	Banyaknya hasil hutan berdasarkan jenisnya menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2017	75
Tabel 4.15	Data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang atas dasar harga konstan tahun 2015-2016.....	76
Tabel 4.16	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2007-2008 (miliar/Juta Rp).....	78
Tabel 4.17	Perubahan Pendapatan Kabupaten Setiap Sektor Di Kabupaten Enrekang Dalam Harga Konstan Tahun 2015-2016	81
Tabel 4.18	Hasil Nilai absolute Setiap Sektor Di Kabupaten Enrekang Dalam Harga Konstan Tahun 2015-2016.....	82
Tabel 4.19	Nilai Absolute Masing-Masing Sektor	84
Tabel 4.20	Sektor Unggul, agak unggul, mundur dan agak mundur	86
Tabel 4.21	Pergeseran Netto Masing-Masing Sektor	88
Tabel 4.22	Hasil Analisis KPN, KPP, KPK dan PN (Net Shif) Setiap Sektor Di Kabupaten Enrekang.....	90
Tabel 4.23	Nilai LQ Masing-Masing Sub Sektor Pertanian	95
Tabel 4.24	Sektor-Sektor Strategis di Kabupaten Enrekang.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi-Selatan	47
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kabupaten Enrekang	56
Gambar 4.3	Peta Tofografi Kabupaten Enrekang.....	58
Gambar 4.4	Peta Hidrolgi Kabupaten Enrekang.....	61
Gambar 4.5	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Enrekang	63



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh sebab itu sangat diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Paradigma mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah relatif tinggi. Pertumbuhan suatu sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah akan berdampak tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga di wilayah lainnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan besaran sumbangan sektor unggulan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakmerataan di dalam pembangunan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi pembangunan suatu wilayah (Rustiadi dkk, 2009). Adanya integrasi

ekonomi yang menyeluruh dan berkesinambungan diantara semua sektor produksi merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi (Daryanto&Hafizrianda, 2010).

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Menyadari kondisi geografis Kabupaten Enrekang dimana didominasi oleh wilayah daratan yang memiliki beraneka ragam potensi wilayah terbentang luas, sehingga sebagian besar penduduk memanfaatkan potensi sumberdaya alam. Potensi yang sangat besar ini dalam usaha pemanfaatan belum terjadi secara optimal. Berbagai permasalahan dalam pemanfaatan potensi wilayah untuk dapat dikelola secara baik sebagaimana potensi, pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata dll) kini masih jauh tertinggal sehingga menggambarkan suatu kelemahan bagi masyarakat luas inilah yang terjadi di Kabupaten Enrekang. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam perkembangan

pembangunan wilayah, sehingga dibutuhkan solusi dan pemahaman sebagai metode yang mampu memperlihatkan keterkaitan spasial.

Pentingnya dalam pembangunan wilayah adalah mengetahui potensi daerah tertentu yang berada pada tipe yang dikembangkan atau tidak dapat berkembang lagi, sehingga perencanaan pembangunan yang akan datang dapat disusun lebih tepat dalam menjawab kendala serta permasalahan yang ada.

Sektor unggulan dapat menjadi dasar pertimbangan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Sektor unggulan akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa pada suatu wilayah sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Secara makro pertumbuhan atau kenaikan PDRB dari tahun ketahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang disumbangkan oleh 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yaitu: (1) Sektor Pertanian (2) Sektor Pertambangan dan penggalian (3) Sektor Industri Pengolahan (4) Sektor Listrik dan Gas (5) pengadaan Air bersih (6) Sektor Konstruksi (7) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (8) Sektor Transportasi dan Pergudangan (9) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (10) sektor Informasi dan Komunikasi (11) Sektor jasa Keuangandan Asuransi (12) Sektor Real

Estate (13) Sektor Jasa Perusahaan (14) Sektor Administrasi Pemerintahan dan jaminan Sosial (15) Sektor Jasa Pendidikan (16) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (17) Sektor Jasa lainnya. Pendekatan makro yang meliputi penetapan sektor unggulan utama (*basic sector*) sebagai faktor pemicu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, penetapan sektor unggulan penunjang sebagai sektor yang berfungsi mendukung perkembangan dan keberlangsungan terhadap sektor unggulan utama, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan penetapan sektor pendukung (*non basic sector*) sebagai sektor yang berfungsi mendorong dan memperlancar sektor unggulan tersebut.

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor unggulan di Kabupaten Enrekang adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut. Setiap kabupaten harus mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya dengan sektor unggulan yang ada di daerahnya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah. Pembangunan ekonomi

daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Enrekang yang telah dikemukakan diatas, sudah saatnya potensi riil sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Enrekang harus memperoleh perhatian dan strategi dalam pengembangannya. Kebijakan operasionalnya dapat dikaitkan dengan program otonomi daerah dengan memperhatikan potensi unggulan yang berbasis pada sumberdaya Lokal.

Dari latar belakang diatas yang dijelaskan maka dapat dia ambil judul skripsi sebagai berikut **“KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN ENREKANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Sektor-sektor ekonomi apakah yang berpotensi sebagai sektor unggulan di Kabupaten Enrekang
2. Berapa besar kontribusi sektor unggulan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi mana yang paling Potensial sebagai sector unggulan untuk dikembangkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaeten Enrekang.
2. Untuk menganalisis Kontribusi Potensi Sektor Unggulan Kabupaeten Enrekang dalam pertumbuhan ekonominya.

D. Manfaat Penelitian

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang perkembangan perekonomian daerah khususnya daerah Kabupaten Enrekang.
2. Masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Enrekang dalam rangka mempersiapkan program pembangunan selanjutnya, serta terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberi batasan pada penelitian ini agar pembahasan didalamnya lebih sistematis maka perlu kiranya dilakukan pembatasan. Ruang lingkup pembahasan untuk penelitian ini lebih membatasi pada :

1. Lingkup pembahasan yang mencakup dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Enrekang
2. Kajian terhadap Sektor Sektor yang berkembang di Kabupaten Enrekang
3. Mengetahui seberapa besar sektor sektor unggulan tersebut memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Enrekang.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, kerangka pembahasan, defenisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan kepentingan analisis studi, terutama yang berisikan tentang teori-teori pengembangan wilayah, Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan kajian sector Unggulan.

BAB III METODE PENELITIAN.

Pada bab ini berisi tentang kondisi lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan analisis serta alat analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian membahas mengenai hasil dan pembahasan, yang meliputi; gambaran umum wilayah Penelitian, potensi sumberdaya alam, potensi sektor jasa dan ekonomi, pertumbuhan PDRB, analisis penentuan sektor strategis, analisis penentuan sektor unggulan, dan Kontribusi pengembangan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Enrekang.

BAB V PENUTUP.

Bab ini merupakan bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengembangan Wilayah

Sumbangan pemikiran von Thunen terhadap pengembangan wilayah adalah penentuan kawasan (zoning) menurut berbagai jenis usaha (pertanian). Kontribusi teori Weber yaitu mengenai munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi / industri (aglomerasi). Esensi teori tempat sentral (Christaller) adalah identifikasi pusat-pusat nodal menurut struktur hirarkis dan lingkup pelayanan (daerah belakangnya), teori tempat sentral telah telah melandasi dikembangkannya teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan yang menekankan pada dinamisme dan aglomerasi industri-industri, memungkinkan di susunnya kebijakan secara simultan, yaitu yang utama adalah pusat-pusat nodal yang dominant dan disamping itu mendesenralisasikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Konsep Hirschman dengan *trickling-down-efek*-nya menganjurkan untuk memperbanyak titik-titik pertumbuhan sejalan dengan anjuran ini Friedman merekomendasikan pembentukan agropolitan dalam rangka menunjang penyebaran pembangunan ke seluruh daerah. Teori simpul jasa distribusi menekankan pada peran jasa distribusi sebagai pendukung utama arus barang yang mempunyai peranan penting

dalam proses perkembangannya wilayah melalui simpul-simpul yang tersusun secara hirarkis. Meskipun masing-masing mempunyai cara pandang sendiri namun terdapat relevansi dari konsep dan teori-teori di atas, yaitu mencakup empat unsure fundamental pengembangan wilayah yaitu terdiri dari (1) pusat nodal (hirarki konfigurasi dan orientasi jasa distribusi secara geografis), (2) wilayah pengaruh atau wilayah pelayanan, (3) jaringan transportasi dan (4) orientasi jasa distribusi secara geografis.

B. Pertumbuhan Wilayah

Teori pertumbuhan wilayah merupakan bagian penting dalam analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, karena pertumbuhan merupakan suatu unsur utama dalam pembangunan ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi wilayah ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Di samping itu, analisis pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah.

a. Tujuan dan Manfaat Teori Pertumbuhan

Walaupun sangat disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, namun demikian sedemikian jauh pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting

dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan di sinib dapat berbentuk provinsi, kabupaten dan kota.

Tidak dapat disangka bahwa pertumbu ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembanguna nasional dan daerah di samping pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan , target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Melalui pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula ditingkatkan.

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi Wilayah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi tersebut masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat setempat. Karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu perumbuhan ekonomi daerah akan sangat penting artinya bagi Pemerintah Daerah dlam menentukan kebijakan dan upaya yang dapat di lakukan untuk mendorong perumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh secara

cepat sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lainnya juga saling berkaitan. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut perlu diketahui secara rinci. Di samping itu perlu pula diteliti seberapa besar pengaruh dan kontribusi dari masing-masing faktor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu secara keseluruhan. Hasil penelitian ini nantinya akan sangat penting artinya sebagai salah satu masukan bagi Pemerintah Daerah dan pihak berwenang lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah atau dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah bersangkutan.

b. Model Pertumbuhan Ekonomi

Pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi wilayah ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lima puluhan, yaitu pada saat perhatian terhadap pembangunan daerah mulai meningkat di dunia internasional. Tujuan utama analisis ini adalah untuk membahas secara rinci dan mendalam tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Perkembangan Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan sampai saat ini menunjukkan bahwa secara umum terdapat tiga model pertumbuhan yang cukup terkenal dan bersifat dominan. Masing-masing model menggunakan variabel dan formulasi tersendiri, sehingga menghasilkan analisis dan kesimpulan berbeda tentang

faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional yang berbeda pula. Penerapan model-model ini dapat dilakukan secara utuh atau ada pula dalam bentuk penggabungan dari beberapa model tertentu, tergantung kondisi wilayah yang bersangkutan. Berikut ini ide pokok dan formulasi model pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

1. Model Basis Ekpor (*Export-Base Model*)

Teori basis ekspor adalah bentuk model pendapatan yang paling sederhana. Teori ini sebenarnya tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari ekonomi makro interregional karena teori ini menyederhanakan suatu sistem regional menjadi dua bagian, yaitu daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah lainnya.

Masyarakat itu dapat dinyatakan sebagai suatu sistem sosial ekonomi. Sebagai suatu sistem, keseluruhan masyarakat melakukan perdagangan dengan masyarakat lain diluar batas wilayahnya. Faktor penentu (determinan) pertumbuhan ekonomi dikaitkan secara langsung kepada permintaan akan barang dari daerah lain diluar batas masyarakat ekonomi regional. Pertumbuhan industry yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan material untuk komoditas ekspor akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar

ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis (Richardson, 1977,14). Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan kedalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa didalam wilayah tersebut, sehinggah pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya, berkurangnya aktifitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir kedalam suatu wilayah, sehinggah akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari permintaan non basis. Walaupun teori basis ekspor mengandung kelemahan yang membagi perekonomian regional menjadi dua sektor kegiatan yakni basis dan on basis, namun upaya tersebut dapat bermanfaat sebagai saran untuk memperjelas pengertian mengenai struktur daerah atau wilayah yang bersangkutan dan bukan sebagai alat untuk membuat proyeksi jangka endek atau jangka panjang.

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (*location*

quotient LQ) LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis unggulan (*leading sectors*) dalam teknik LQ berbagai faktor dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja dan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah.

Salah satu teori yang mengemukakan pentingnya pertumbuhan ekonomi adalah teori basis ekspor. Teori ini berintikan bahwa pertumbuhan wilayah bergantung pada permintaan yang datang dari luar wilayah tersebut. Dengan demikian peningkatan atau penurunan ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan ekspor, yang berupa produksi barang dan jasa yang dijual ke luar wilayah. Pentingnya teori ini terletak pada kenyataan bahwa ia memberikan kerangka teoritik bagi banyak studi multiplier regional empiris. Asumsinya adalah bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur otonom dalam pengeluaran, pendapatan regional adalah kelipatan dari ekspor jika hasrat marginal untuk membelanjakan secara lokal lebih kecil daripada satunya (Harry Richardson, 1991). North dalam teori Export Base-nya menyebutkan bahwa masuknya pertambahan penduduk dan modal yang sangat besar dalam suatu wilayah dapat memberikan sumbangan besar dalam pengembangan wilayah.

2. Model *Interregional Income*

3. Shift-Share Analysis

4. Model Neo-Klasik

5. Model Penyebab Berkumulatif

6. Model Kota dan Desa

C. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999 dalam Saerofi, 2005). Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2003), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang

ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama periode 1969-1981 mencapai tingkat rata-rata 7,7% setahun. Tetapi mulai tahun 1982 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun menjadi rata-rata 4% per tahun (Yuliadi, 2009).

Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005):

a. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang

kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik pengusaha-pengusaha dari negara-negara atau daerah yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam tersebut diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

b. Jumlah dan Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar tergantung pada pendapatan dan jumlah penduduk.

Akibat buruk penambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan

faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi ataupun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

c. Barang-barang modal dan tingkat ekonomi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang telah bertambah jumlahnya dan teknologi yang bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, di antaranya sikap hemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Di sisi lain sikap

masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

D. Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan jangka panjang. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara/masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan, menurut Schumpeter, adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam tiga pengertian sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional riil dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Defenisi ini tidak memuaskan, karena tidak mempertimbangkan berbagai perubahan misalnya pertumbuhan penduduk. Jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional riil dibarengi dengan perumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan kemajuan tapi adalah sebaliknya yaitu kemunduran.

- a. Prof. Meier mendefinisikan pembangunan ekonomi “ sebagai proses kenaikan dengan pendapatan riil per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang”. Prof. Baran membenarkan “ perumbuhan (atau pembangunan) ekonomi adalah kenaikan output per kapita barang-barang material dalam sustau jangka waku”.

Defenisi di atas menekankan bahwa pembangunan ekonomi dicerminkan oleh tingkat kenaikan pendapatan riil lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Defenisi tersebut mengabaikan masalah yang berkaitan dengan struktur masyarakat, struktur penduduk, lembaga dan budaya masyarakat, dan bahkan distribusi out put diantara anggota masyarakat.

2. Ada kecenderunga untuk mendefinisikan pembangunan ekonomi dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonomi. Misalnya pendapatan nasional riil per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat keseluruhan. Defenisi ini mempunyai beberapa keterbatasan :

- a. Kenaikan pendapatan nasional atau per kapita riil, jika si kaya bertambah kaya dan si miskin bertambah miskin, berarti kesenjangan bertambah lebar;
- b. Dalam mengukur kesejahteraan ekonomi harus hati-hati, output dapat dinilai berdasarkan harga pasar, sedangkan kesejahteraan ekonomi diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil;
- c. Harus dipertimbangkan tidak saja barang apa yang diproduksi, tetapi juga bagaimana barang tersebut diproduksi. Misalnya output yang meningkat terjadi karena jam kerja yang panjang atau membaiknya kondisi kerja tenaga buruh.

Pembangunan (*development*) adalah suatu konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup pula modernisasi kelembagaan, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bukan ekonomi, seperti pemerintahan, kota, desa, cara berpikir; tidak saja yang berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara efisien, melainkan juga agar mengkonsumsi secara rasional dan hidup lebih baik. Kesemuanya itu membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan mendahului atau berbarengan dengan perubahan sosial. Pertumbuhan ekonomi membuka jalan bagi kemajuan.

Pembangunan hendaknya diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dalam proses ini, pada hakekatnya merupakan proses

transformasi sosial, maka perlu dipelihara “pertimbangan segitiga” antara perubahan, ketertiban, dan keadilan, dengan cara tertentu yang akan memperkokoh kebebasan manusia dalam masyarakat (Soedjatmoko,1984;19).

E. Model Pembangunan Ekonomi wilayah

Model pembangunan dartikan sebagai kerangka berpikir yang obyektif dan rasional berdasarkan konsep, teori dan paradigma dalam bentuk konstruksi strategis guna memecahkan berbagai masalah bagi kepentingan masyarakat. Model pembangunan dapat dilihat dari berbagai dimensi, dilihat dari dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya administrasi dan lainnya. Berdasarkan perkembangannya, model pembangunan ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang, dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Model I, meniti beratkan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an. Model pembangunan I ini berorientasi pada peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan pelaksanaan penanaman modal atau investasi dalam jumlah besar di sektor industri dengan cara menempatkan kelompok proyek yang satu sama lain saling menunjang dipusatkan pada suatu wilayah atau bagian wilayah. Manfaat saling penunjang

dari pembangunan sumberdaya industri dan prasarana yang dipusatkan tersebut akan dirasakan oleh sektor-sektor terkait. Dan selanjutnya akan menyebar dan di perluas ke bagian wilayah lainnya. Strategi investasi besar tersebut akan menciptakan “eksternalitas ekonomi” yang dinikmati oleh berbagai kegiatan yang terkait berupa efisiensi ekonomi yang ditimbulkan oleh kelompok industri tersebut.

Dengan pembangunan industri dan eksternalitas ekonomi akan dicapai peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ke seluruh bagian wilayah melalui proses *trickling-down effect* (tetesan ke bawah). Dalam model pembangunan I, yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan adalah PDRB per kapita, tingkat penanaman modal dan tabungan

- b. Model II, menitik beratkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok yang berkembang pada dekad 1970-an. Strategi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi mengabaikan aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan, tidak menjangkau lapisan masyarakat yang miskin, berarti dilakukan penentuan sasaran pembangunan yang lebih tepat, yaitu strategi “kebutuhan pokok”

- c. Model III, menitikberatkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang berkembang pada dekade 1980-an.
- d. Model IV, yang berkembang akhir abad ke-20 dan memasuki dekade ke-21, dimana dunia mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu memasuki era globalisasi dan liberalisasi, perdagangan bebas dan persaingan bebas antar negara akan menjadi ketat, maka diperlukan penguatan daya saing ekonomi masing-masing wilayah.

F. Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah

Agar berkembang dengan cepat dan selaras dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan sasaran ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan, strategi apakah yang tepat untuk diterapkan oleh suatu wilayah. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang pada akhirnya ditujukan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan untuk mengambil keputusan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.

Suatu strategi pembangunan seharusnya mengacu pada perangkat kebijakan dan kegiatan yang secara luas memberikan perhatian pada hal-hal berupa prasarana, penanaman modal pemerintah, keseimbangan antara berbagai sektor antar wilayah, serta peranan yang timbul dari perdagangan antar wilayah.

G. Pengertian Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Tri Widodo, 2006). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Sambodo (dalam Firman, 2007), ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut:

- a. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- b. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatif besar.
- c. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan depan ataupun kebelakang.
- d. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

H. Sektor-Sektor Strategis.

Pembangunan dalam waktu luas selalu mengacu pada proses perubahan baik struktur ekonomi maupun sosial budayanya yang dapat menciptakan kemajuan bagi kehidupan umat manusia. Proses ini berdemensi global, meliputi; perubahan-perubahan mendasar

dalam struktur sosial, pola pikir masyarakat, kelembagaan, pengurangan disparitas, pemberantasan kemiskinan absolut dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu daerah menurut Hoover dan Giarrantani (1984), pada dasarnya diakibatkan oleh interaksi antara sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan investasi. Secara makro hasil interaksi tersebut dapat dianalisis dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Bourdeville (1961) menampilkan teori pertumbuhan dan mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai perangkat industri sedang berkembang yang teralokasi disuatu wilayah dan mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut melalui wilayah pengaruhnya. Mengingat pembangunan dilaksanakan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan, maka pendekatan sektor perlu digunakan untuk mendekatkan pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenis kedalam sektor strategis. Dengan pendekatan ini pembangunan dapat dikelola pada lingkup nasional maupun daerah. Sektor tersebut dalam pembangunan wilayah menurut Adisasmita (1994) terdapat sektor-sektor strategis. Sektor strategis yang dimaksud adalah:

1. Sektor yang menghasilkan produksi dan mempunyai kontribusi besar terhadap nilai PDRB.

2. Sektor yang terinterpretasikan memberikan lapangan kerja lebih besar.
3. Sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan yang kuat terhadap pengembangan sektor lainnya.
4. Sektor yang potensial meningkatkan ekspor nonmigas walaupun kontribusi terhadap PDRB relatif kecil tetapi sektor tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan.

I. Teori Tempat Sentral

Teori Tempat Sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat dimana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dari industri yang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional kota-kota. (Prasetyo Supomo 2000:415).

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan daerah lainnya hanya sebagai wilayah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi

daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

J. Pengembangan Sektor Potensial

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensipotensi pembangunan (Tjokroaminoto 1995:74). Berdasarkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, maka adanya sektor potensial di suatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Lincoln Arsyad (1999:165) mengatakan bahwa sampai dengan akhir dekade 1980-an, di Indonesia terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut adalah:

1. Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada sektor yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage). Pemikiran seperti ini boleh dikatakan diwakili oleh kalangan ekonom-akademis.
2. Konsep Delapan Wahana Transformasi Teknologi dan Industri yang di kemukakan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Habiebie), yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara serentak (simultan).

3. Konsep keterkaitan antar industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir.
Konsep ini merupakan konsep menteri perindustrian (Tungki Ariwibowo).

Sebagai indikator analisis evaluasi, metode klarifikasi dan validasi dari perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tuntutan kerangka acuan kerja digunakan analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu metode untuk menggali aspek-aspek kondisi sektoral yang terdapat di suatu kawasan yang direncanakan untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan sektoral tersebut. Istilah SWOT itu sendiri merupakan pendekatan dari variabel-variabel penilaian sebagaimana telah diuraikan di atas (dalam penegasan istilah halaman 7).

K. Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral.

Arsyad (1999:108), berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumber-sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan

kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektorsektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

L. Teori interaksi spasial:

Merupakan arus gerak yang terjadi antara pusat-pusat pelayanan baik berupa barang, penduduk, uang maupun yang lainnya. Untuk itu perlu adanya hubungan antar daerah satu dengan yang lain karena dengan adanya interaksi antar wilayah maka suatu daerah akan saling melengkapi dan bekerja sama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Dalam teori ini didasarkan pada teori gravitasi, dimana dijelaskan bahwa interaksi antar dua daerah merupakan perbandingan terbalik antara besarnya massa wilayah yang bersangkutan dengan jarak keduanya. Dimana massa wilayah diukur dengan jumlah penduduk. Model interaksi spasial ini mempunyai kegunaan untuk:

- 1) Menganalisa gerakan antar aktivitas dan kekuatan pusat dalam suatu daerah.

2) Memperkirakan pengaruh yang ada dan ditetapkannya lokasi pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya. Interaksi antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain sebagai produsen dan konsumen serta barang-barang yang diperlukan menunjukkan adanya gerakan. Produsen suatu barang pada umumnya terletak pada tempat tertentu dalam ruang geografis, sedangkan para langganannya tersebar dengan berbagai jarak di sekitar produsen.

M. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah.

Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu bagaimana memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad, 1999). Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya. Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang

harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit (Arsyad, 1999).

Beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian diantaranya:

1. Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal (berdasarkan fungsinya).
2. Data yang dibutuhkan umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
3. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan sebab perekonomian daerah lebih terbuka jika dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.
4. Bagi negara sedang berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang terbatas itu pun banyak yang kurang akurat dan terkadang relatif sulit dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian yang sebenarnya di suatu daerah.

N. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Angka Produk Domestik Regional Bruto sangat dibutuhkan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan satu indikator ekonomi untuk mengukur kemajuan pembangunan di suatu wilayah. Selain nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, PDRB bermanfaat untuk mengetahui tingkat produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan pola (struktur) perekonomian pada satu tahun periode tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu, Prihatin (1999) dalam Azis (2012). Penyajian PDRB terdapat dua cara, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), artinya semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. Atau dengan kata lain PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai

produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan (pengeluaran) yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat (keseluruhan) maupun sektor. Selain itu juga bermanfaat untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah berdasarkan distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai total PDRB. Selain itu, pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat inflasi atau deflasi yang terjadi. Menurut Widodo (2006), untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan produksi, maksudnya PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai

unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor), yaitu : 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

- b. Pendekatan pendapatan, maksudnya PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswataan), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
- c. Pendekatan Pengeluaran, maksudnya PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:
 - (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba,

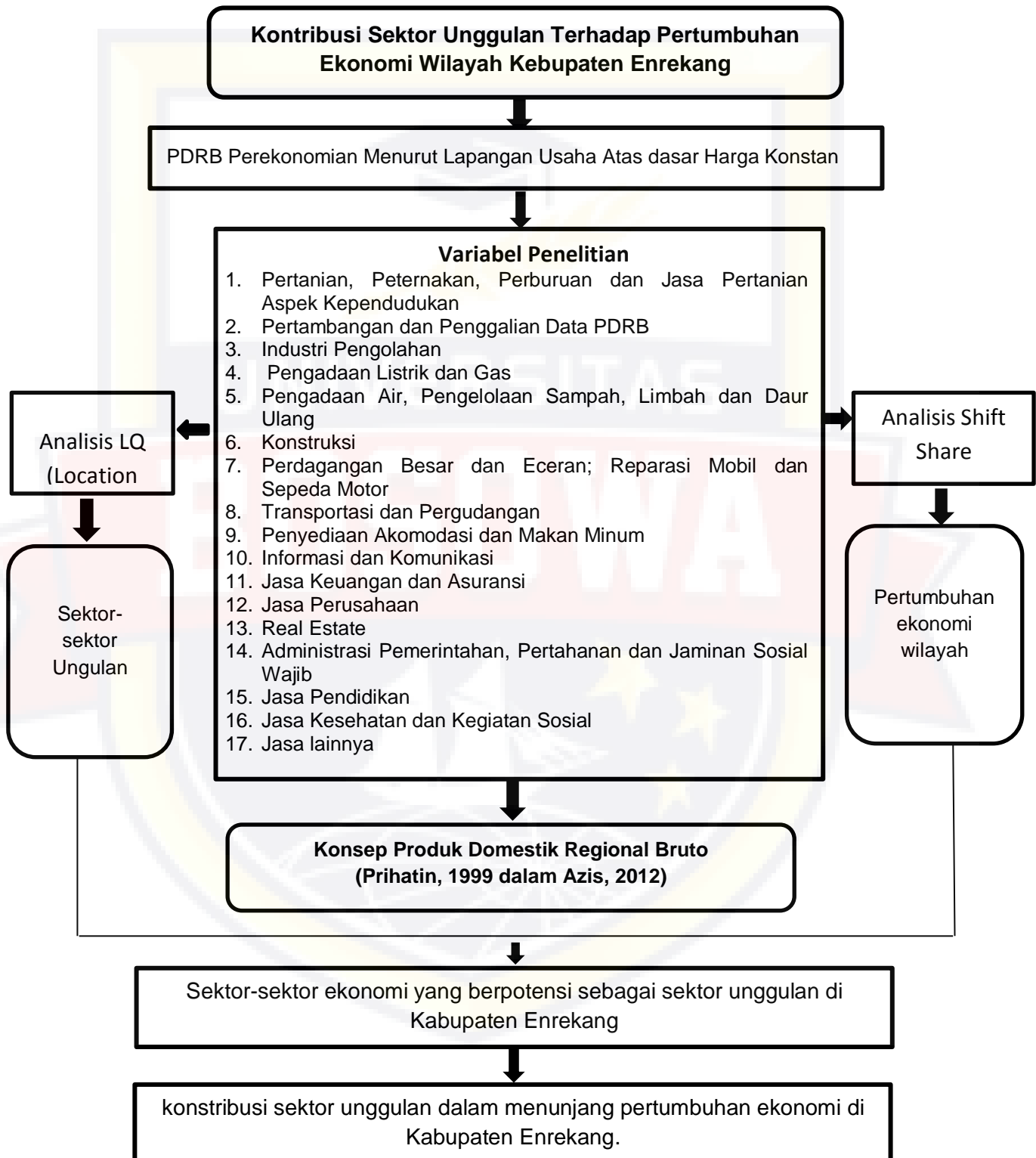
- (2) konsumsi pemerintah,
- (3) pembentukan modal tetap domestik bruto,
- (4) perubahan stok, dan
- (5) ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB dibagi dalam sembilan sektor, yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Listrik, Gas dan Air Bersih,
5. Bangunan,
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran,
7. Pengangkutan dan Komunikasi,
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Sedangkan secara makroekonomi dibagi menjadi tiga kelompok besar yang disebut sebagai sektor primer terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta bangunan dan sektor tersier terdiri atas sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya serta jasa-jasa (Prihatin, 1999) dalam (Azis, 2012).

O. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Enrekang . Alasan untuk memilih lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yaitu, Terdapat berbagai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah:

1. Data PDRB Kabupaten Enrekang dan data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan
2. Data kependudukan
3. Data aspek fisik wilayah dan data-data sekunder lainnya yang relevan dengan tujuan penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam proses penulisan, turut menentukan teknik pengumpulan data yang harus dilakukan dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan

dalam penelitian ini di peroleh melalui kantor BPS atau Instansi-
instansi terkait bertujuan untuk memperoleh data-data yang
dibutuhkan seperti, Data PDRB Kabupaten Enrekang dan data PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan, Data kependudukan serta data aspek fisik
wilayah dan data-data sekunder lainnya yang relevan.

D. Variabel Penelitian

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik
perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang menjadi
subyek penelitian meliputi ;

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

E. Metode Analisis

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukan
untuk kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang ada,

1. Analisis LQ (Location Quotient)

Teknik analisis LQ merupakan cara permulaan untuk mengetahui
kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu, tapi cara ini
belum memberikan kesimpulan akhir. Walaupun belum memberikan
kesimpulan akhir, namun dalam tahap pertama sudah cukup
memberikan gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan
dalam sektor yang diamati.

Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan
koefisien dapat menggunakan hasil produksi atau satuan lain yang

dapat dijadikan sebagai criteria. Perbandingan relative ini dinyatakan secara matematis, sebagai berikut;

Sumber : (Tarigan, Robinson)

$$LQ = \frac{S_i/N_i}{S/N} = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Dimana:

LQ = Location quention

S_i = Jumlah Produksi i di daerah yang diselidiki

S = Jumlah Produksi seluruhnya di daerah yang diselidiki

N_i = Jumlah Produksi i di seluruh Wilayah

N = Jumlah keseluruhan produksi diseluruh Wilayah

Penafsiran:

- a. Jika Nilai LQ = 1, Maka produksi yang ada di Kabupaten Enrekamg Selatan hanya cukup untuk kebutuhan lokal.
- b. Jika Nilai LQ < 1, Maka Kabupaten Enrekang mengimpor hasil produksi dari luar.

- c. Jika Nilai LQ > 1, Maka Kabupaten Enrekang mengeksport hasil produksinya ke daerah lain.

Sumber : (Tarigan, Robinson)

2. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor mana yang maju/unggul dan berpengaruh positif terhadap pendapatan kabupaten dan memiliki daya saing/keunggulan komperatif serta mengetahui sektor yang kurang maju dan berpengaruh negatif terhadap pendapatan kabupaten. Dalam analisis ini digunakan data PDRB Kabupaten Enrekang dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan untuk melihat sejauh mana perkembangan sektor-sektor tersebut. Adapun rumus matematis dari analisis Shift Share adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{PEK = KPN + KPP + KPK}$$

Dimana:

PEK = Perubahan Pendapatan Kabupaten

KPN = Komponen Pertumbuhan Nasional

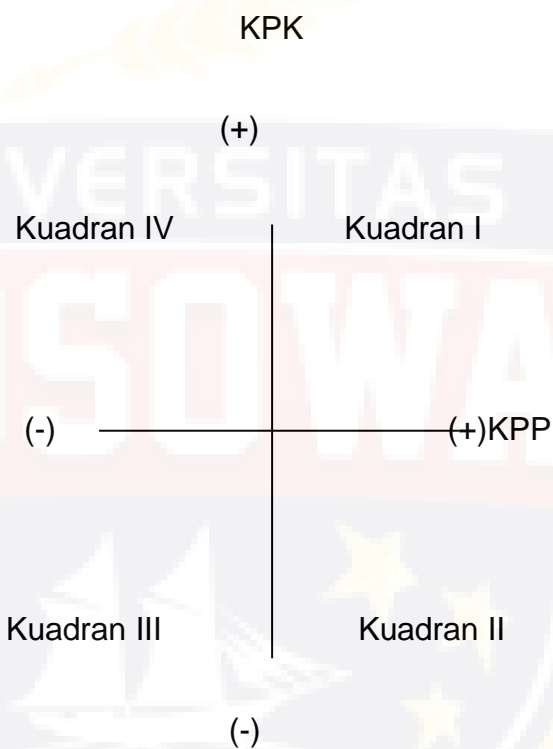
KPP = Komponen Pertumbuhan Proporsional

KPK = Komponen Pertumbuhan Kabupaten

Sumber : (Metode Analisis Perencanaan II)

- **Analisis Grafik**

Metode analisis *Grafik* merupakan bagian dari analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui sub sektor unggul, agak unggul, dan agak mundur serta sub sektor mundur. Identifikasi terhadap sub sektor tersebut dilihat dari nilai KPP dan nilai KPK. Lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut;



Ketentuan :

Kuadran I : Sektor unggul yaitu nilai KPP dan KPK positif

Kuadran II : Sektor agak mundur yaitu nilai KPP positif dan KPK negatif

Kuadran III: Sektor mundur yaitu nilai KPK negatif dan KPP negatif

Kuadran IV: Sektor agak unggul yaitu KPK positif dan KPP negatif

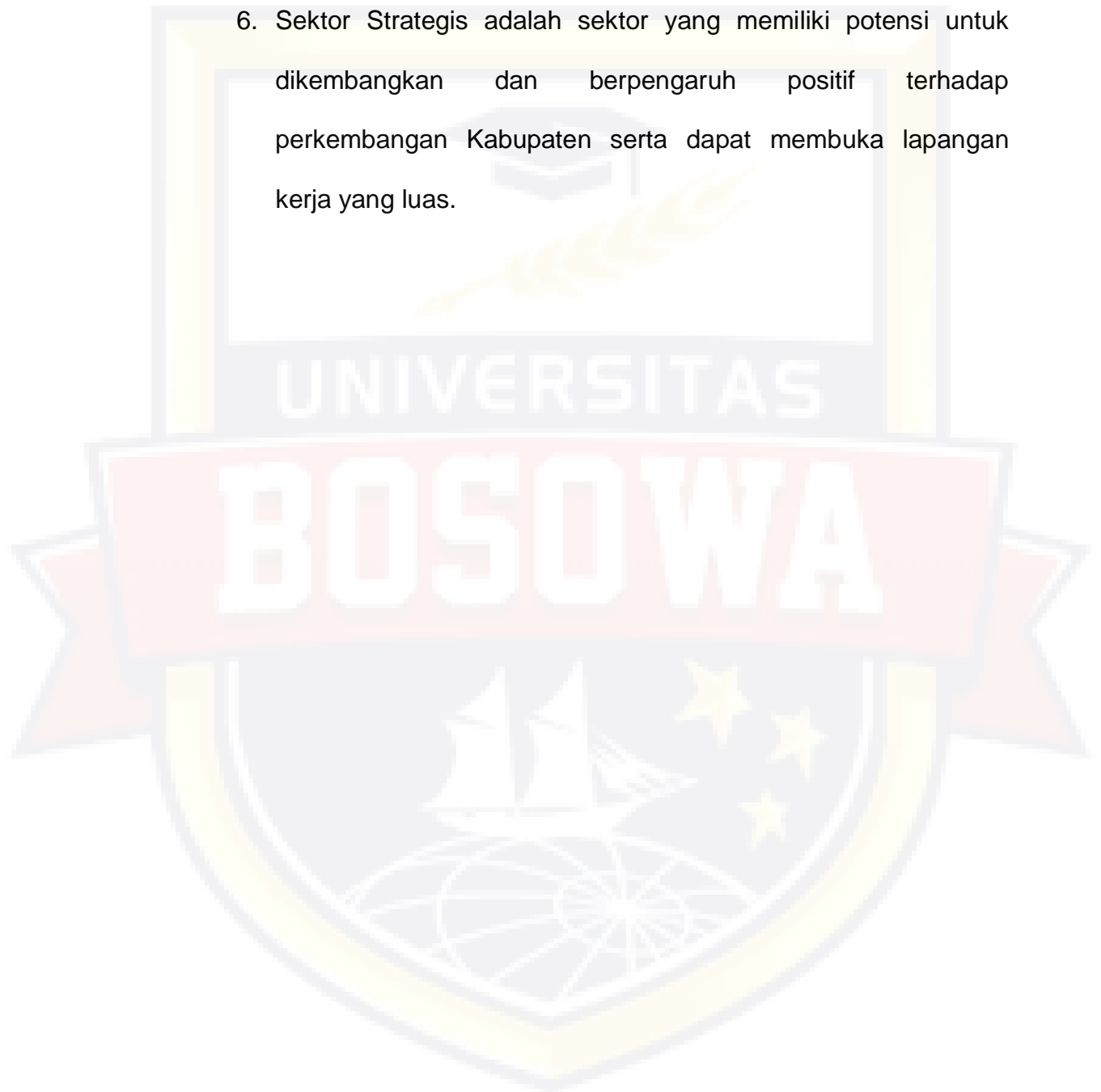
F. Defenisi Operasional.

Defenisi operasional adalah pengertian menurut peneliti terhadap suku kata yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini, yang meliputi :

1. Sektor Unggulan adalah Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Oleh suatu wilayah.
2. Pertumbuhan Ekonomi adalah Peningkatan dalam sejumlah komoditas yang digunakan atau diperoleh suatu wilayah.
3. Pertumbuhan ekonomi Wilayah adalah Pertambahan Pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di Wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai nilai tambah (added value) yang terjadi.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai neto barang dan jasa (komoditi) yang diproduksi pada suatu wilayah domestik/wilayah tanpa memperhatikan faktor-faktor produksinya
5. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu bersaing dengan sektor lain baik dalam skala kabupaten maupun skala propinsi, dengan melihat tingkat pertumbuhan Komponen Pertumbuhan

Proporsional (KPP) dan Komponen Pertumbuhan kabupaten (KPK).

6. Sektor Strategis adalah sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan berpengaruh positif terhadap perkembangan Kabupaten serta dapat membuka lapangan kerja yang luas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

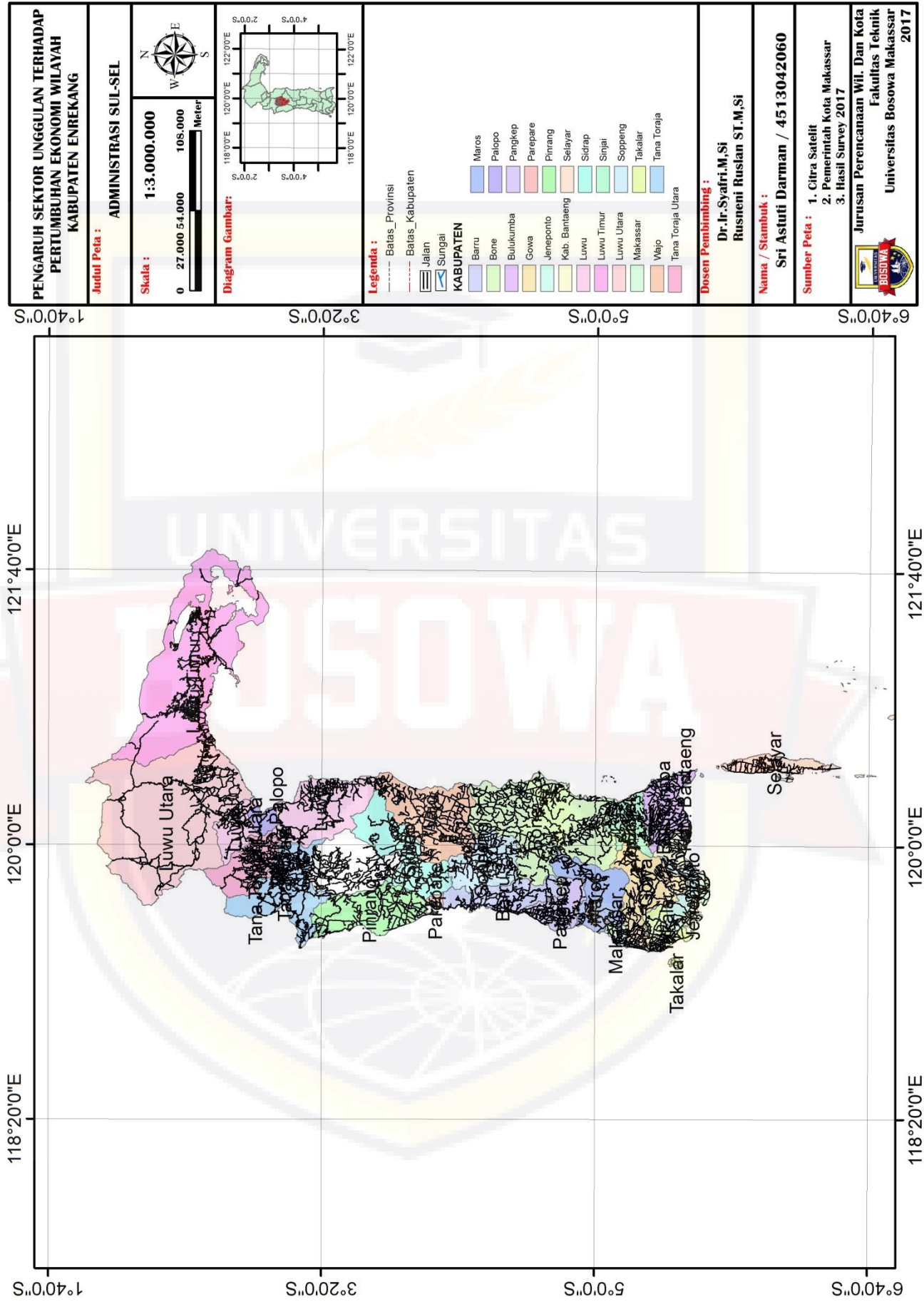
A. Gambaran Umum Wilayah

1. Gambaran Umum Sulawesi-Selatan

a. Letak Geografi

Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak antara 0012'~80 lintang selatan dan 1160 48'~122' 36' bujur timur, yang berbatasan dengan provinsi Sulawesi barat di sebelah utara dan teluk bone serta provinsi sulawesi tenggra di sebelah timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah timur. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih 45.519,24 km² persegi, dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada jasirah pulau barat daya Sulawesi serta sebagian wilayahnya pada jasirah pulau tenggara sulawesi.

Gambar. 4.1
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi-Selatan



b. Topografi

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi kemiringan tanah 0 sampai 3 % merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 % merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 % merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45 % tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Terdapat sekitar 65 sungai yang mengalir di provinsi ini, dengan jumlah sungai terbesar ada di bagian utara wilayah provinsi ini. Lima danau besar menjadi rona spesifik wilayah ini, yang tiga di antaranya yaitu Danau Matana, Danau Towuti dan Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Kebijakan penanggulangan..., (Andi Erwing, FISIP UI, 2010). Timur, serta dua danau lainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo.

c. Kabupaten/Kota

Jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebanyak 23, yaitu Tana Toraja, Bone, Gowa, Luwu, Makassar, Bulukumba, Maros, Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Pinrang, Bantaeng,

Enrekang, Wajo, Takalar, Luwu Utara, Sinjai, Sidenreng Rappang, Selayar, Soppeng, Barru, Palopo dan Pare-Pare.

d. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 7.496.701 jiwa dengan rincian lakilaki 3.641.844 jiwa (48,58%) dan perempuan 3.852.857 jiwa (51,42%) dengan tingkat kepadatan 165 jiwa/km².

2. Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang

Tentang Penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan Kabupaten Enrekang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam melalui inovasi dan pengembangan sumber daya manusia menuju Kabupaten Enrekang yang maju dan mandiri .

1. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

a. Visi Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

Terwujudnya Enrekang Maju Aman Sejahtera (EMAS) menuju daerah agropolitan berwawasan lingkungan.

Pernyataan visi diatas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi,

sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Enrekang, dimaknai sebagai suatu kesatuan wilayah Kabupaten Enrekang yang dihuni oleh seluruh warga masyarakat, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Maju, kondisi dimana terjadi peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), ketersediaan infrastruktur yang memadai serta aplikasi teknologi.

Aman, mengandung makna keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintah, sosial budaya, aktifitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju.

Sejahtera, dimaknai keadaan dimana terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat,

serta terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara layak.

Menuju Daerah Agropolitan, dalam pengertian bahwa periode pembangunan lima (5) tahun kedepan (2014-2018) sebagai tahapan dari proses mewujudkan daerah agropolitan 2028 sesuai visi jangka panjang daerah, yang ditandai dengan kondisi berkembangnya pusat-pusat ekonomi berbasis pertanian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian, yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai aktifitas ekonomi pendukung utama sistem agribisnis pertanian di Sulawesi Selatan.

Berwawasan lingkungan, diartikan sebagai komitmen memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup masyarakat masa kini dan masa mendatang

b. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kota Enrekang Tahun 2014-2018 sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum

(jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, irigasi/sumber air pertanian, listrik dan telekomunikasi) yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik

2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi, yaitu meningkatkan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, berkualitas didukung oleh penguasaan iptek dalam meningkatkan produktifitas dan kompetensi masyarakat

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki perempuan, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercerminkan dari berkurangnya tingkat korupsi, dan meningkatkan kinerja pelayanan publik serta terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan dan keadilan gender, agar

memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata

4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat agribisnis dan agroindustri, yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan membedayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi dan komoditi unggulan daerah, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat.

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, yaitu mengembangkan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam di sektor pertanian, pertambangan, SDA, dan pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

3. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

a. Letak Geografi

Kabupaten Enrekang dengan ibukota Kecamatan Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Kota Makassar. Wilayah Kabupaten Enrekang ini terletak antara 3⁰14'36" sampai 3⁰50'0" Lintang Selatan dan antara 119⁰40'53" sampai 120⁰6'33" Bujur Timur.

Penetapan batas administrasi dalam ruang perencanaan menjadi batas kewenangan perencanaan, namun bukan menjadi batas absolute yang membatasi fungsi dan peran satu kawasan berkembang melampaui batas-batas wilayah administrasinya. Nilai-nilai potensi, keunikan dan keunggulan lokal senantiasa menjadi dasar referensi mengapa satu kawasan tidak direncanakan berdasarkan batas administrasinya tetapi lebih kepada batas-batas wilayah yang mencerminkan batas pengaruh dari peran dan fungsi yang diemban satu wilayah. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Enrekang yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja;
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Sidrap;
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap;
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang.

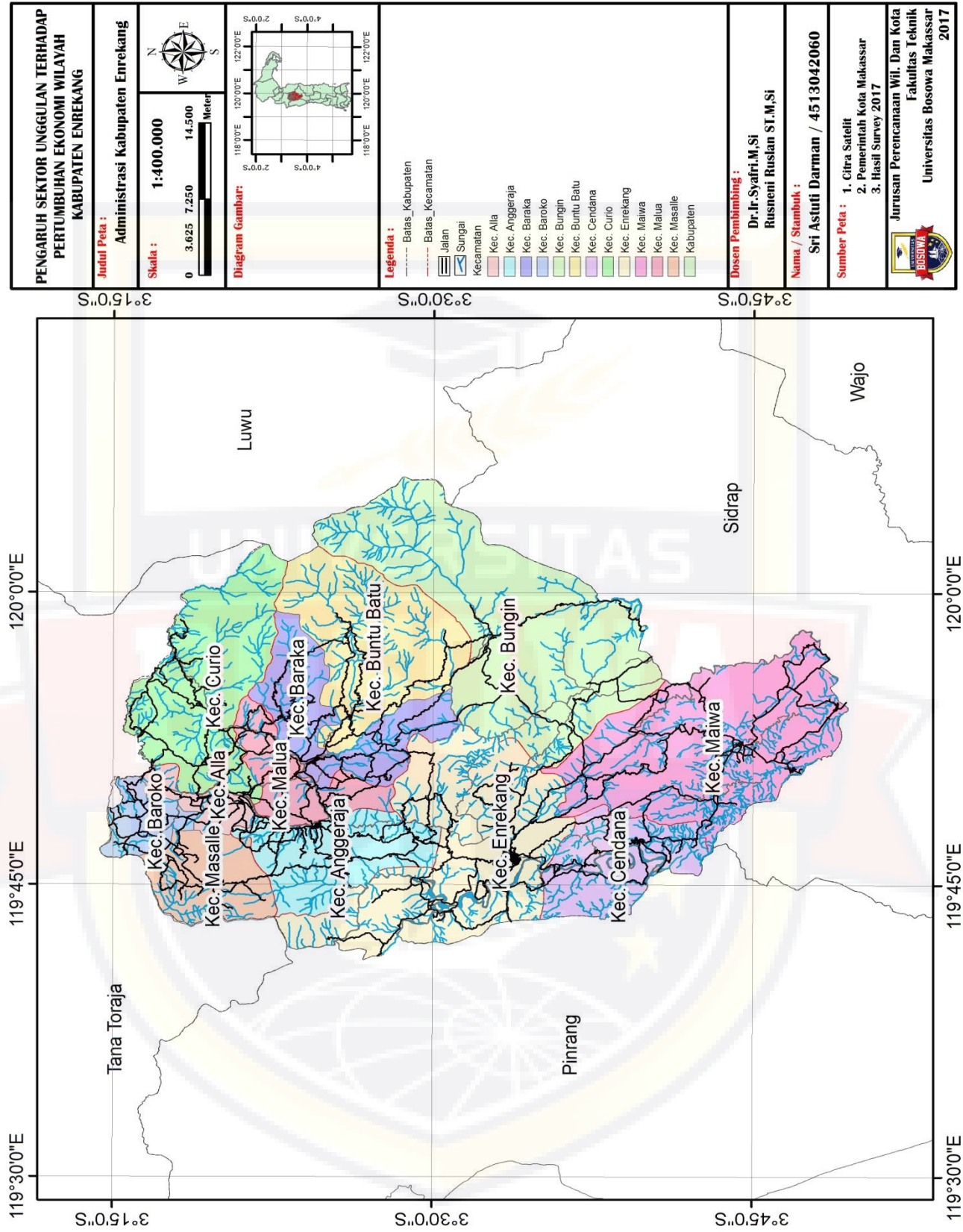
Secara administratif wilayah Kabupaten Enrekang Terdiri atas 12 kecamatan dengan 129 desa/kelurahan yang memiliki luas yang berbeda beda-beda. Kecamatan yang terluas adalah Maiwa dengan luas 392,87 km² atau 20% dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla dengan Luas 34,66 km² atau 3,19% dari luas Kabupaten Enrekang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah
Desa/Kelurahan tiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang
tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Maiwa	392,87	21,99	22
2	Bungin	236,84	13,26	6
3	Enrekang	291,19	16,30	18
4	Cendana	91,01	5,10	7
5	Baraka	159,15	8,91	15
6	Buntu batu	126,65	7,09	8
7	Anggeraja	125,34	7,02	15
8	Malua	40,36	2,26	8
9	Alla	34,66	1,94	8
10	Curio	178,51	9,99	11
11	Masalle	68,35	3,83	6
12	Baroko	41,08	2,30	5
Jumlah		1786,01	100,00	129

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang 2017

Gambar. 4.2
Peta Administrasi Kabupaten Enrekang



PENGARUH SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN ENREKANG	
Judul Peta : Administrasi Kabupaten Enrekang	
Skala : 1:400.000 0 3.625 7.250 14.500 Meter	Diagram Gambar:
Legenda : - - - - - Batas_Kabupaten - - - - - Batas_Kecamatan Jalan Sungai Kecamatan Kec. Alla Kec. Anggeraja Kec. Baraka Kec. Baroko Kec. Bungin Kec. Buntu Batu Kec. Cendana Kec. Curio Kec. Enrekang Kec. Maiwa Kec. Malua Kec. Masalle Kabupaten	Dosen Pembimbing : Dr.Ir.Syaifri,M.Si Rusneni Ruslan ST,M,Si Nama / Stambuk : Sri Astuti Darman / 4513042060 Sumber Peta : 1. Citra Satelit 2. Pemerintah Kota Makassar 3. Hasil Survey 2017
Jurusan Perencanaan Wil. Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar 2017	

b. Topografi

Kabupaten Enrekang merupakan wilayah yang berada pada daerah ketinggian, pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 mdpl serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96 persen dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya sebesar 15,04 persen.

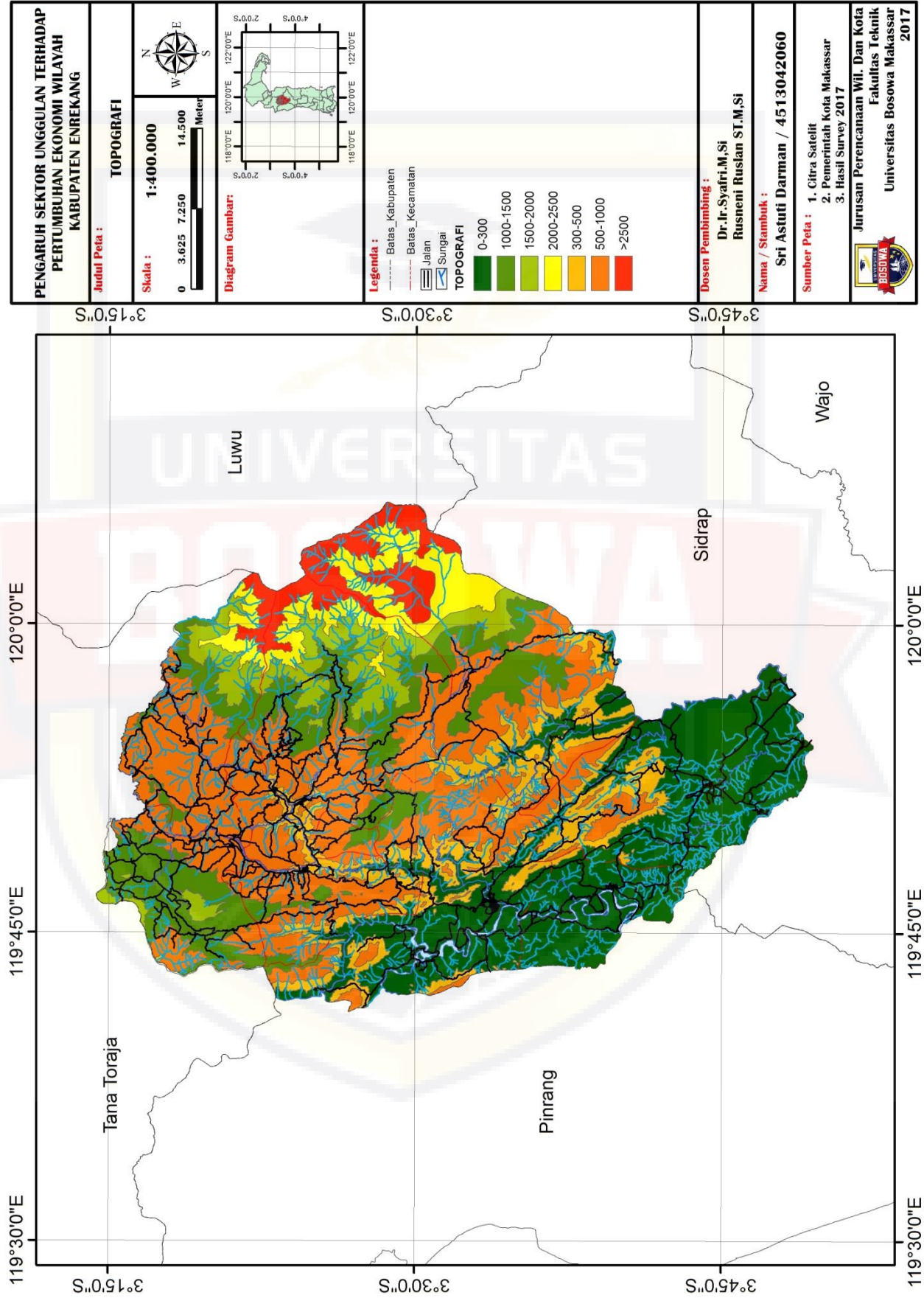
Kondisi topografi Kabupaten Enrekang adalah Bervariasi dari datar hingga curam. Keadaan wilayah berdasarkan kelerengan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Keadaan wilayah Kabupaten Enrekang Menurut tingkat kelerengan tahun 2016 (%)

Tingkat Kelerengan	Kriteria	Luas (Ha)	Prosentase (%)
0- 2	Datar	13.841	7,71
2-15	Landai	12.758	7,11
15-40	Agak Curam	75.175	41,90
>40	Curam	76.295	42,52
Jumlah		179.420	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang 2017

Gambar. 4.3
Peta Topografi Kabupaten Enrekang



c. Kondisi Iklim Dan Curah Hujan

Kondisi Iklim Wilayah Kabupaten Enrekang dan sekitarnya secara umum ditandai jumlah hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim. Pada dasarnya angin musim di Kabupaten Enrekang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang merupakan Daerah pegunungan dan hampir sama dengan musim yang ada pada daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan yang terjadi pada bulan Desember-Juni sedangkan musim kemarau yang terjadi pada bulan Agustus-September. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di
Kabupaten Enrekang, 2016

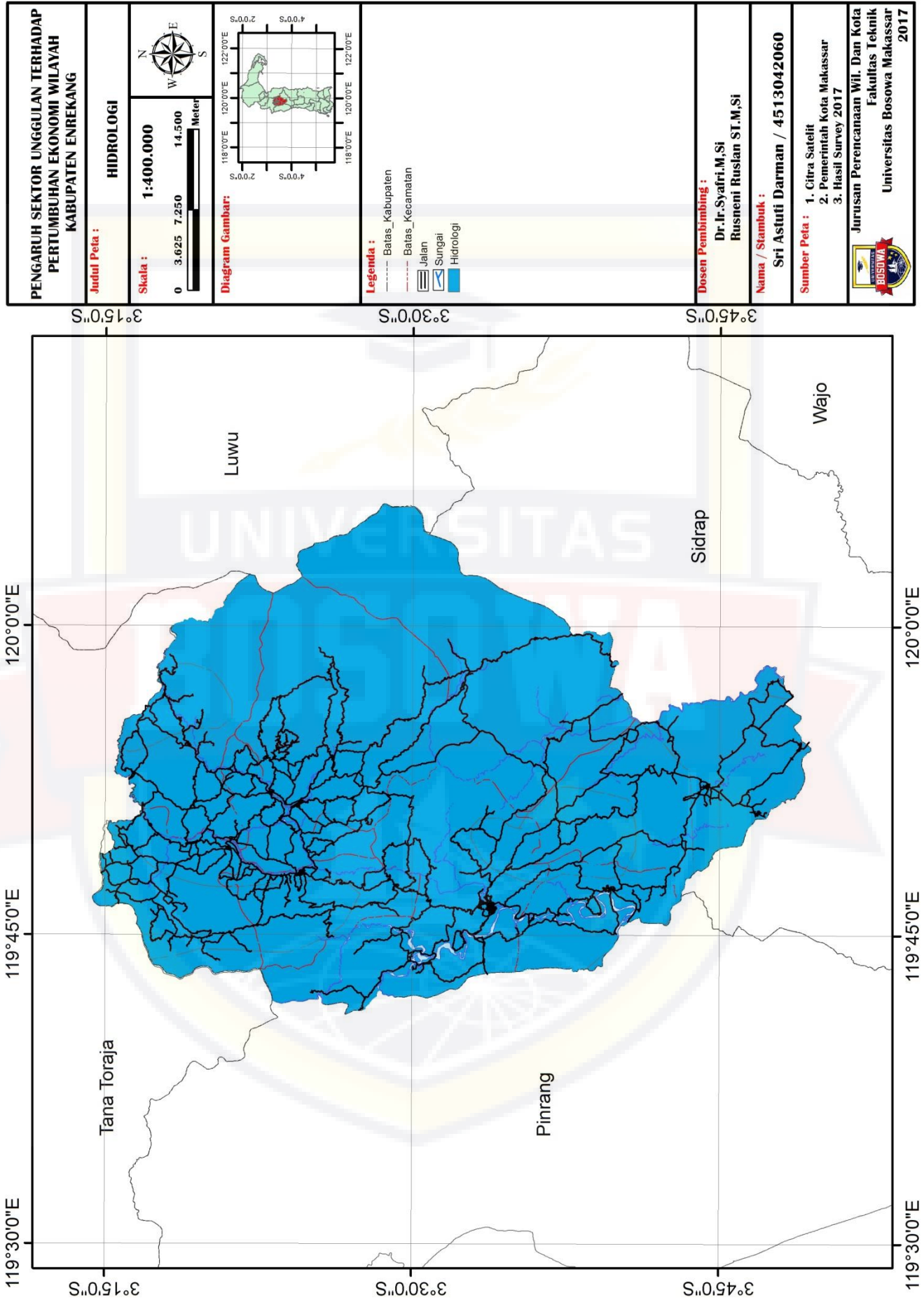
No	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	1.701	170
2	Februari	2.318	203
3	Maret	2.147	197
4	April	2.646	225
5	Mey	1.488	148
6	Juni	2.767	206
7	Juli	305	35
8	Agustus	78	19
9	September	21	3
10	Oktober	458	44
11	November	1.604	137
12	Desember	3.076	197

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang 2017

d. Hidrologi

Hidrologi di Kabupaten Enrekang hampir sama dengan hidrologi yang ada pada daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berasal dari air PDAM, sumur galian, maupun sumur dengan kedalaman 2-10 meter dimana jumlah debit airnya tergantung dari musim. Di Kecamatan Alla, Anggeraja, Malua, Baraka, Buntu Batu, Curio, Enrekang untuk saat ini menggunakan sumber mata air berupa air PDAM, sumur galian maupun sumur bor, sedangkan untuk Kecamatan Maiwa, Bungin, Cendana, Masalle dan Baroko hanya menggunakan sumber mata air sumur galian atau sumur bor.

Gambar. 4.4
Peta Hidrologi Kabupaten Enrekang



e. Penggunaan Lahan

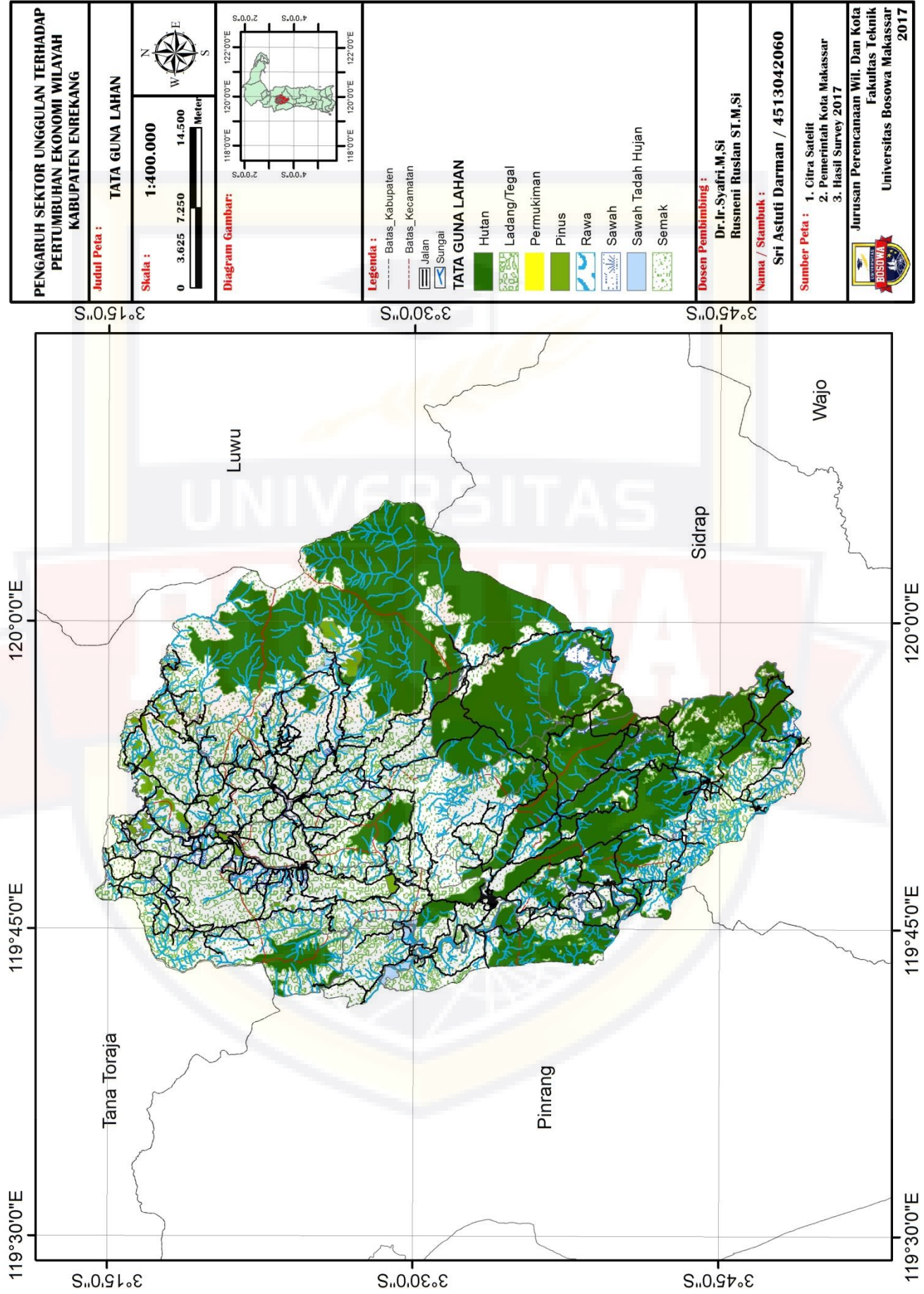
Kabupaten Enrekang adalah 178.601 hektar (1.786,01 km) yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian itu terbagi menjadi sawah, tegal/kebun, lading/huma.Hutan rakyat.Padang rumput, sementara tidak diusahakan dan lainnya (tambak, kolam, empang, hutan Negara) sedangkan untuk lahan bukan pertanian misalnya seperti lahan yang digunakan untuk rumah, rawa-rawa, jalanan dan lainnya.

Tabel 4.4
penggunaan Lahan Kabupaten Enrekang tahun 2016
dalam hektar

Jenis Tanah	Tahun/2016
Lahan pertanian sawah	10 861
Lahan pertanian bukan sawah	155 846
Lahan bukan pertanian	11 894
Total Luas Wilayah	178 601

Sumber : BPS kabupaten Enrekang tahun 2017

Gambar. 4.5
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Enrekang



f. Jumlah Penduduk

Jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk dalam wilayah penelitian merupakan sebuah Indikator yang penting untuk diketahui. Penduduk Kabupaten Enrekang secara umum selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2016

no	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Maiwa	23.599	23.895	24.261	24.531	24.782
2	Bungin	4.398	4.461	4.426	4.443	4.452
3	Enrekang	31.069	31.511	31.737	31.996	32.221
4	Cendana	8.789	8.913	8.805	8.825	8.833
5	Baraka	21.582	21.890	22.801	22.278	22.455
6	Buntu Batu	13.012	13.194	13.351	13.482	13.602
7	Anggeraja	24.310	24.657	24.867	25.109	25.330
8	Malua	7.802	7.915	8.000	8.087	8.166
9	Alla	21.068	21.365	21.729	21.974	22.201
10	Curio	15.162	15.376	15.715	15.919	16.108
11	Masalle	12.486	12.663	12.715	12.804	12.881
12	Baroko	10.406	10.554	10.507	10.550	10.583
Kabupaten Enrekang		193.683	196.394	198.194	199.998	201.614

Sumber : BPS kabupaten Enrekang 2017

g. Mata pencaharian penduduk

Berdasarkan data, maka mata pencaharian penduduk di Kabupaten Enrekang, masih di dominasi oleh masyarakat yang bekerja pada sektor, pertanian , perdagangan, dan jasa kemasyarakatan . sedangkan jenis mata pencaharian lainnya, seperti: industri, dan lainnya , relatif masih rendah. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Enrekang masih dominan mengelolah sumber daya alam . lebih jelasnya sebagaimana pada tabel :

Tabel 4.6
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
Di Kabupaten Enrekang 2016

No.	Lapangan Pekerjaan	Jenis kelamin		jumlah
		Laki-laki	perempuan	
1	Pertanian	38 953	20.623	59.576
2	Industri	2 632	152	2.784
3	Perdagangan	3 048	7.956	11.004
4	Jasa kemasyarakatan	5.497	6.028	11.525
5	lainnya	4.294	433	4.727
jumlah		54.424	35.192	89.616

Sumber:BPS Kabupaten Enrekang 2017

h. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumberdaya Alam melimpah yang dimiliki pada suatu wilayah sangat memberikan kontribusi bagi PAD serta peningkatan ekonomi masyarakat pada wilayah tersebut.

Pada potensi sumberdaya alam memuat sub pembahasan mengenai sumberdaya perkebunan, Sumberdaya pertanian, sumberdaya perikanan, sumberdaya kehutanan dan sumberdaya peternakan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut;

a. Sumber Daya Pertanian

1) Sumber Daya Pertanian Pangan

Kegiatan pertanian tanaman pangan adalah kegiatan pertanian yang memerlukan air terus menerus sepanjang tahun, dengan komoditi utamanya adalah padi sawah (wetland rice).

Pertanian lahan basah memerlukan kedalaman efektif tanah minimal 60 cm. Produktifitas dan kualitas mutu panen cenderung menurun bila kedalaman efektif tanah menurun.

Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 30 cm.

Sedang tekstur tanah yang terbaik bagi jenis pertanian bagi jenis pertanian lahan basah adalah tanah yang berliat, berdebu halus,

sampai berlempung halus. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi Tanaman Pangan pertanian di Kabupaten

Enrekang sebagaimana pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Jumlah Produksi Tanaman Pangan dirinci Menurut Kecamatan Di
Kabupaten Kabupaten Enrekang Tahun 2016

No	Kecamatan	Produksi (ton/Tahun)							Σ
		Padi Sawah	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	
1	Maiwa	22285,64	17333,7	576	119	46,8	-	-	40361,14
2	Bungin	3028,9	61,2	-	-	-	-	-	3090,1
3	Enrekang	1914,5	28210,2	120	384,3	50,16	6	1,6	30686,76
4	Cendana	3324,2	12166	195	22,5	1	4,8	-	15713,5
5	Baraka	7829	7520,8	165	60	28	19,53	6,3	15628,63
6	Buntu Batu	3358,92	1287,9	255	37,5	-	-	-	4939,32
7	Anggeraja	20,55	4735,8	-	1760	96,6	-	0,8	6613,75
8	Malua	1022,96	3420	880	374	78	-	3,2	5778,16
9	Alla	438,2	507,6	170	88	4	2,4	1,6	1211,8
10	Curio	10301	2886	221	120	-	-	-	13528
11	Massale	54,75	240	153	456	21,6	9,6	-	934,95
12	Baroko	161,4	52,8	68	-	-	-	-	282,2
Jumlah		50.149,87	53740,02	78372	2803	3421,3	322,51	42,33	138768,3

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017

2) Sumber daya Pertanian Holtikultura

Pada kegiatan pertanian lahan kering, jenis komoditi yang dibudidayakan terutama adalah tanaman palawija dan holtikultura (sayuran dan buah-buahan). Pada dasarnya kriteria penentuan kesesuaian lahan kering hampir sama dengan kriteria penentuan kesesuaian lahan basah. Hal ini terutama dalam hal tekstur tanah, resiko banjir dan genangan, kedalaman efektif tanah.

Pertanian lahan kering juga memerlukan kedalaman efektif tanah minimal 60 cm. Produktivitas dan mutu panen pada pertanian lahan kering cenderung menurun bila kedalaman efektif tanah menurun. Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 30 cm. Sedangkan tekstur tanah yang terbaik bagi jenis pertanian lahan kering adalah tanah yang berliat, berdebu halus, sampai berlempung halus. Dalam hal ini tanah yang berkuarsa sangat tidak sesuai untuk pengembangan pertanian kecuali kandungan kuarsanya sedang.

Berdasarkan hasil produksi dari jenis komoditi Holtikultura dan sayuran Kabupaten Enrekang diantaranya Bawang Merah, Cabe, Tomat, Kentang, Buncis, Kubis, Wortel, Cabe Besar, Kacang Merah, Labu Siam. Dimana jenis komoditi Bawang Merah memiliki produksi paling banyak pada tahun 2016 yaitu 136.656 ton/tahun. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.8

Tabel 4.8.
Jumlah Produksi Sayuran dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Enrekang Tahun 2016

No	Kecamatan	(Produksi Ton Tahun)										Σ
		Bawang Merah	Cabai	Tomat	Kentang	Buncis	Kubis	Wortel	Cabai Besar	Kacang Merah	Labu Siam	
1	Maiwa	-	-	5	-	-	-	-	47,5	-	-	52,5
2	Bungin	-	1595	27	-	-	-	3	144	5,5	-	1774,5
3	Enrekang	274,5	539	30,4	-	-	-	-	50,4	-	-	894,3
4	Cendana	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	60
5	Baraka	57180	520	2535	-	629	4080	-	280	202,5	460	65886,5
6	Buntu Batu	213,1	107,5	151,5	-	843	478	-	-	-	-	1793,1
7	Anggeraja	74728,5	4212	8620	15	254 2,5	1140	1700	785	80	360	94183
8	Malua	1072	227	136,5	-	287, 5	70	20	212	67,5	-	2092,5
9	Alla	1754,6	719,4	4220	70	585	4974,5	-	680	99,5	1306,7	14409,7
10	Curio	12	599	2330	-	400	1975	-	744	71,5	-	6131,5
11	Massalle	1189,6	336,2	7850,4	137	157, 5	11626,5	4544	195,1	240	1707	27983,3
12	Baroko	231,8	617	3626	126,4	226, 4	11503	374	441,5	56	5159,7	22361,8
Jumlah		136656	9472,1	29531,8	348,4	567 0,9	35847	6641	3639,5	822,5	8993,4	237623

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017

b. Sumber daya Perkebunan

Sumber daya perkebunan merupakan potensi suatu wilayah yang harus di kelola secara baik agar mampu memberikan penghidupan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Enrekang. Dengan demikian berdasarkan data yang kami peroleh menunjukkan bahwa jenis tanaman perkebunan terdiri dari kelapa, kopi, Lada, Kakao, Cengkeh, Pala, kemiri, coklat, Vanila, Nilam dan tembakau. Sehubungan dengan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat produksi tanaman perkebunan yang paling tinggi di tahun 2016 yaitu jenis tanaman kakao 8640,4Ton/Tahun sedangkan Produksi

Hasil Perkebunan paling rendah yaitu tanaman vanili yang hanya menghasilkan produksi 1,2 Ton/Tahun. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Enrekang, sebagaimana pada tabel 4.9

Tabel 4.9.
Jumlah Produksi Perkebunan dirinci Menurut Kecamatan di Kab.Enrekang tahun 2016

No	Kecamatan	Produksi (Ton/Tahun)										Σ
		Kelapa	Kopi	Lada	Kakao	Cengkeh	Pala	Kemiri	Vanili	Nilam	tembakau	
1	Maiwa	10,5	15,6	10	1402,1	11,7	-	105,2	-	-	-	1555,1
2	Bungin	1,5	685	13	485,6	29,4	-	149,2	-	-	-	1363,7
3	Enrekang	81,2	386,1	8	1265	18	24	84,4	-	-	-	1866,7
4	Cendana	15,8	-	4,8	827	1,8	0,1	32	-	-	-	881,5
5	Baraka	0,8	6,30	106,5	525,7	51,5	0,1	6,2	0,1	38,4	-	735,6
6	Buntu Batu	1,2	1641,7	140	156,6	104,2	0,1	6,3	-	-	-	2050,1
7	Anggeraja	2	72,9	6	282	2,7	-	7,6	0,4	-	-	373,6
8	Malua	3,3	285,7	179,5	212,8	41,5	0,2	4,2	-	38,4	-	765,6
9	Alla	22,6	531,3	17,5	62,4	6,3	-	3,4	0,1	-	-	643,6
10	Curio	8,5	369	362,4	358	242,1	-	3,3	0,1	-	25,9	1369,3
11	Massale	-	799,2	5,6	40,7	24,8	-	0,4	0,2	-	-	870,9
12	Baroko	-	1278	0,8	22,7	49,9	-	-	0,3	-	-	1351,7
	Jumlah	146,7	6687,9	854,1	8640,4	583,9	24,5	402,2	1,2	76,8	25,9	13827,4

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017

c. Sumber Daya Peternakan

1) Populasi ternak

Dengan demikian berdasarkan data yang kami peroleh menunjukkan bahwa jenis populasi dan jenis ternakan terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, dan kambing.

Sehubungan dengan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat produksi ternak yang paling tinggi di tahun 2016 yaitu jenis ternak kambing sebanyak 51.843 ekor sedangkan Produksi ternak paling rendah yaitu ternak kuda sebanyak 131 ekor . Oleh karena itu untuk lebih jelasnya Jumlah Produksi ternak di Kabupaten Enrekang, sebagaimana pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Populasi ternak menurut kecamatan dan jenis ternak di kabupaten Enrekang tahun 2017

No	Kecamatan	Sapi perah	sapi potong	Kerbau	Kuda	kambing
1	Maiwa	3	11.345	1.152	14	710
2	Bungin	0	2.480	8	0	52
3	Enrekang	167	13.630	6	16	4.334
4	Cendana	729	4.473	32	0	192
5	Baraka	23	4.026	786	30	5.335
6	Buntu Batu	18	1.185	64	44	5.376
7	Anggeraja	215	3.526	57	4	4.044
8	Malua	12	1.894	426	2	7.626
9	Alla	56	957	50	0	8.383
10	Curio	42	2.008	972	8	6.351
11	Masalle	5	1.166	25	10	4.624
12	Baroko	53	899	152	3	4.816
	jumlah	1.323	47.589	3.730	131	51.843

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017

2) Populasi Unggas

Berdasarkan data yang kami peroleh menunjukkan bahwa jenis populasi dan jenis unggas terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Sehubungan dengan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat produksi unggas yang paling tinggi di tahun 2016 yaitu jenis ayam petelur sebanyak **1.069.323** ekor sedangkan Produksi unggas paling rendah yaitu itik sebanyak **6.136** ekor . Oleh karena itu untuk lebih jelasnya Jumlah Produksi ternak di Kabupaten Enrekang, sebagaimana pada tabel 4.11

Tabel 4.11
Populasi unggas menurut Kecamatan dan jenis unggas
di Kabupaten Enrekang tahun 2016

No	Kecamatan	ayam kampung	ayam petelur	ayam pedaging	Itik
1	Maiwa	51.975	968.631	109.827	280
2	Bungin	19.473	1.368	0	125
3	Enrekang	60.009	32.378	70	71
4	Cendana	14.960	46.971	0	155
5	Baraka	33.881	1.368	0	2.069
6	Buntu Batu	16.029	0	0	2.244
7	Anggeraja	29.629	12.861	0	0
8	Malua	38.510	0	76	700
9	Alla	18.254	5.472	5	367
10	Curio	36.391	0	0	0
11	Masalle	12.414	0	11	89
12	Baroko	8.460	274	69	36
	jumlah	339.985	1.069.323	110.058	6136

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017

3) . Subsektor Perikanan Darat

Berdasarkan data yang kami peroleh menunjukkan bahwa jenis perikanan darat terdiri dari ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan tawes, ikan bawal, dan lain-lain. Sehubungan dengan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat produksi perikanan yang paling tinggi di tahun 2016 yaitu jenis ikan mas sebanyak **448,58** ton sedangkan Produksi ikan paling rendah yaitu ikan bawal sebanyak **3,70** ton. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya Jumlah Produksi ternak di Kabupaten Enrekang, sebagaimana pada tabel:

tabel. 4.12 Produksi Subsektor Perikanan Darat menurut Jenis Ikan per Kecamatan di Kabupaten Enrekang (Ton), 2016

No	Kecamatan	Ikan Mas	Ikan Lele	Ikan Patin	Ikan Nila	Ikan Tawes	Ikan bawal	Lain - Lain	Jumlah total
1	Maiwa	96,09	2,18	102,55	3,96	1,13	0,53	0,52	206,96
2	Bungin	40,08	2,86	57,63	0	1,20	1,11	0,78	103,66
3	Enrekang	15,17	0	34,90	3,95	0,17	0,12	1,11	55,42
4	Cendana	28,23	1,14	18,24	3,92	0,43	0,19	2,05	54,2
5	Baraka	43,77	1,50	26,74	0	0,44	0,13	1,86	74,44
6	Buntu Batu	22,97	2,11	36	0	0,42	0,14	1,17	62,81
7	Anggeraja	38,94	1,12	17,21	0	0,31	0,17	1,19	58,94
8	Malua	62,02	1,14	43,65	0	0,31	0,50	1,44	109,06
9	Alla	30,83	0	14,25	0	0,51	0,41	1,42	47,42
10	Curio	31,22	1,12	14,24	0	0,18	0,40	0,16	47,32
11	Masalle	16,15	0	9,54	0	0	0	0,13	25,82
12	Baroko	23,11	0	4,83	0	0	0	0,11	28,05
	jumlah	448,58	13,80	379,78	11,83	5,20	3,70	11,94	874,1

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2017

d. Kehutanan

Menurut fungsinya hutan di bagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan konservasi. Kawasan hutan lindung tercatat seluas 71.787 Ha, dan hutan produksi terbatas sekitar 9.858 Ha. Dengan demikian luas hutan di kabupaten Enrekang sekitar 81.645 Ha. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel di bawah :

Tabel 4.13
Luas kawasan hutan menurut kecamatan di kabuten
Enrekang (hektar) 2016

No	Kecamatan	Hutan lindung	Suaka alam	Hutan produksi terbatas	jumlah
1	Maiwa	6411	-	3648	10059
2	Bungin	20490	-	-	20490
3	Enrekang	10335	-	745	11080
4	Cendana	1595	-	1008	2603
5	Baraka	4238	-	-	4238
6	Buntu Batu	10481	-	-	10481
7	Anggeraja	7818	-	1557	9375
8	Malua	70	-	-	70
9	Alla	265	-	204	469
10	Curio	6813	-	-	6813
11	Masalle	2865	-	2402	5267
12	Baroko	406	-	294	700
	jumlah	71787	-	9858	81645

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang 2017

Hasil hutan yang ada di Kabupaten Enrekang seperti, rotan dan kokon dimana setiap tahunnya dapat memproduksi hasil hutan tersebut. Terlihat dari data, bahwa untuk jenis rotan sebanyak 23,00 ton, dan produksi kokon sebanyak 1,764 ton per tahun. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel dibawah :

Tabel 4.14
Banyaknya hasil hutan berdasarkan jenisnya menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2017

No	Kecamatan	Hasil Hutan	
		Kokon	Rotan
1	Maiwa	-	23,00
2	Bungin	-	-
3	Enrekang	-	-
4	Cendana	-	-
5	Baraka	-	-
6	Buntu Batu	-	-
7	Anggeraja	-	-
8	Malua	0,154	-
9	Alla	1,61	-
10	Curio	-	-
11	Masalle	-	-
12	Baroko	-	-
	jumlah	1,76	23,00

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang 2017

i. Data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang atas dasar harga konstan tahun 2015-2016

Pendapatan Regional atas dasar harga konstant sangat penting untuk melihat perkembangan riil dari tahun ke tahun

dari setiap agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan produk domestic regional bruto secara keseluruhan, nilai tambah sektoral (PDRB) sektoral atau komponen penggunaan produk domestic regional bruto. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan dapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.15
Data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang
atas dasar harga konstan tahun 2015-2016

NO	Usaha	Sulawesi Selatan		Kabupaten Enrekang	
		2015	2016	2015	2016
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	54.071.306,49	58.438.329,21	1.488.982,30	1.606.911,31
2	Pertambangan dan Penggalian	15.802.951,88	15.955.668,77	115.616,30	127.884,22
3	Industri Pengolahan	35.555.679,63	38.454.807,25	260.079	279.375,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	230.439,29	256.978,89	5.302,79	5.815,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	302.864,34	319.333,38	3.833,50	4.135,83
6	Konstruksi	29.967.277,25	31.989.277,59	508.939,10	545.193,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34.915.413,25	38.360.682,17	369.982,81	409.719,06
8	Transportasi dan Pergudangan	9.142.461,79	9.858.870,32	34.926,30	38.355,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.370.055,77	3.655.581,42	28.316,88	30.356,12
10	Informasi dan Komunikasi	15.712.599,77	16.989.305,62	156.047,35	172.605,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.662.536,51	9.842.958,71	95.878,03	108.737,09
12	Real Estate	9.197.417,20	9.783.666,67	101.993,10	108.873,28

13	Jasa Perusahaan	1.059.533,29	1.142.988,57	967,37	1.000,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.336.650,91	11.216.999,76	287.103,94	285.139,35
15	Jasa Pendidikan	13.378.000,09	14.295.972,24	74.120,13	79.177,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.845.172,01	5.254.628,77	72.990,30	77.211,90
17	Jasa lainnya	3.207.834,73	3.522.499,25	19.127,10	19.181,88
	PDRB	250.758.194,20	269.338.548,59	3.622.706,00	3.899.612,41

Sumber : BPS kabupaten Enrekang 2017

4. Kecenderungan Pertumbuhan Sektor Kegiatan

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Enrekang tiap dari tahun 2015-2016 yaitu 3,68%, sedangkan pertumbuhan PDRB untuk Propinsi Sulawesi-Selatan tahun 2015-2016 yaitu 3,57% pertahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ketahun terus meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor kegiatan

yang ada di Kabupaten Enrekang memiliki kecenderungan untuk meningkat walaupun terdapat beberapa sektor yang tidak perkembangannya sangat lambat. Untuk lebih jelasnya data PDRB dua tahun terakhir sebagaimana pada table berikut :

Tabel 4.16
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Berdasarkan Harga
Konstan
Tahun 2007-2008 (miliar/Juta Rp)

NO	Usaha	Sulawesi Selatan		Kabupaten Enrekang	
		2015	2016	2015	2016
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	54.071.306,49	58.438.329,21	1.488.982,30	1.606.911,31
2	Pertambangan dan Penggalian	15.802.951,88	15.955.668,77	115.616,30	127.884,22
3	Industri Pengolahan	35.555.679,63	38.454.807,25	260.079	279.375,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	230.439,29	256.978,89	4.925	5.815,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	302.864,34	319.333,38	3.833,50	4.135,83
6	Konstruksi	29.967.277,25	31.989.277,59	508.939,10	545.193,11
7	Perdagangan Besar	34.915.413,25	38.360.682,17	368.482,80	409.719,06
8	Transportasi dan Pergudangan	9.142.461,79	9.858.870,32	34.926,30	38.355,78
9	Penyediaan Akomodasi	3.370.055,77	3.655.581,42	28.316,90	30.356,12
10	Informasi dan Komunikasi	15.712.599,77	16.989.305,62	156.047,30	172.605,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.662.536,51	9.842.958,71	95.878	108.737,09
12	Real Estate	9.197.417,20	9.783.666,67	101.993,10	108.873,28
13	Jasa Perusahaan	1.059.533,29	1.142.988,57	967,4	1.000,26
14	Administrasi Pemerintahan,	11.336.650,91	11.216.999,76	287.103,94	285.139,35

15	Jasa Pendidikan	13.378.000,09	14.295.972,24	74.120,30	79.177,43
16	Jasa Kesehatan	4.845.172,01	5.254.628,77	72.990,30	77.211,90
17	Jasa lainnya	3.207.834,73	3.522.499,25	19.127,10	19.181,88
	PDRB	250.758.194,20	269.338.548,59	3.623.383,00	3.899.672,39
Pertumbuhan PDRB Kab/Propinsi		3,57%		3,68%	

Sumber : BPS kabupaten Enrekang 2017

2. Analisis Pergeseran PDRB

Analisis pergeseran PDRB Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari analisis nilai pergeseran ekonomi kabupaten (PEK) yaitu dengan melihat sejauh mana perkembangan komponen pertumbuhan Nasional (KPN), Komponen pertumbuhan proposional (KPP) dan Komponen pertumbuhan Kabupaten (KPK) pada setiap sektor. Dalam melihat nilai pergeseran kabupaten Enrekang maka ditentukan nilai perubahan masing-masing sektor. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai pergeseran sektor yaitu sektor pertanian 42,52% bergeser menjadi 43,86%, sektor pertambangan 4,42% bergeser menjadi 4,62%, sektor Industri 6,95% bergeser menjadi 6,76%, Sektor pengadaan listrik dan gas 0,32% bergeser menjadi 0,31%, sektor pengadaan air 0,11% mengalami pergeseran menjadi 0,10%, kemudian di sector kontruksi 13,07% bergeser menjadi 13,20%, Perdagangan besar 14,86% bergeser menjadi 14,71%, sektor transportasi dan pergudangan 1,24%

mengalami pergeseran menjadi 1,26%, Penyediaan Akomodasi dan 0,73% tidak mengalami pergeseran, sektor informasi dan komunikasi 5,99% bergeser menjadi 5,11%. Sektor jasa dan asuransi 4,65% bergeser menjadi 4,38%, di sektor real estate 2,49% bergeser menjadi 2,48% pada jasa perusahaan 0,01% bergeser menjadi 0,04% di sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial -0,07% bergeser menjadi -0,94% dan sementara di sektor jasa pendidikan 1,83 % bergeser menjadi 2,07%, jasa kesehatan 1,52% bergeser menjadi 1,29% dan jasa lainnya 0,01% bergeser menjadi -0,03%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua sektor kegiatan yang ada terjadi pergeseran yang relatif kecil baik yang mengalami penambahan maupun sektor yang terjadi pengurangan nilai pergeseran. Adapun nilai perubahan yang dimaksud adalah sebagaimana pada tabel di bawah 4.17:

Tabel. 4.17
Perubahan Pendapatan Kabupaten Setiap Sektor
Di Kabupaten Enrekang Dalam Harga Konstan Tahun 2015-2016

No	Sektor Ekonomi	Data Kabupaten Enrekang		Perubahan	%
		PDRB 2015	PDRB 2016		
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.488.982,30	1.606.911,31	117.929,01	42,52
2	Pertambangan dan Penggalian	115.616,30	127.884,22	12.267,92	4,42
3	Industri Pengolahan	260.079	279.375,45	19.296,45	6,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.925	5.815,21	890,21	0,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.833,50	4.135,83	302,33	0,11
6	Konstruksi	508.939,10	545.193,11	36.254,01	13,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	368.482,80	409.719,06	41.236,26	14,86
8	Transportasi dan Pergudangan	34.926,30	38.355,78	3.429,48	1,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.316,90	30.356,12	2.039,22	0,73
10	Informasi dan Komunikasi	156.047,30	172.605,11	16.557,81	5,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	95.878	108.737,09	12.859,09	4,65
12	Real Estate	101.993,10	108.873,28	6.880,18	2,49
13	Jasa Perusahaan	967,4	1.000,26	32,86	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	287.103,94	285.139,35	-1.964,59	-0,07
15	Jasa Pendidikan	74.120,30	79.177,43	5.057,13	1,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.990,30	77.211,90	4.221,60	1,52
17	Jasa lainnya	19.127,10	19.181,88	54,78	0,01
PDRB		3.623.383	3.623.383,00	277.343,75	100

Sumber : BPS kabupaten Enrekang diolah

3. Analisis shif Share

Untuk menentukan nilai Absolute masing-masing sektor tersebut, maka dapat dilakukan dengan memperkaliakan nilai PDRB Kabupaten Tahun 2015 dengan hasil analisis masing-masing sektor yaitu untuk mengetahui nilai daripada KPP absolute dan KPK absolute, serta perubahan pendapatan kabupaten (PEK). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel Nilai absolut pada masing-masing sektor ekonomi dapat memberikan gambaran, bahwa ada beberapa sektor yang mengalami pergeseran, sehingga dapat dikatakan sektor-sektor tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sektor lain.

Tabel. 4.18
Hasil Nilai absolute Setiap Sektor
Di Kabupaten Enrekang Dalam Harga Konstan Tahun 2015-2016

no	Sektor	Nilai absolute				%
		KPN	KPP	KPK	PEK	
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	11,03	1,49	0,00	12,52	43,86
2	Pertambangan dan Penggalian	0,86	-0,69	1,15	1,32	4,62
3	Industri Pengolahan	1,93	0,26	-0,26	1,93	6,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,02	0,03	0,09	0,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	-0,01	0,01	0,03	0,10
6	Konstruksi	3,77	0,00	0,00	3,77	13,20

7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	1,10	0,37	4,20	14,71
8	Transportasi dan Pergudangan	0,26	0,03	0,07	0,36	1,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	0,03	-0,03	0,21	0,73
10	Informasi dan Komunikasi	1,16	0,15	0,15	1,46	5,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,67	-0,09	1,25	4,38
12	Real Estate	0,71	-0,10	0,10	0,71	2,48
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	-2,29	0,00	-0,27	-0,94
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,07	0,00	0,59	2,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,51	0,00	-0,14	0,37	1,29
17	Jasa lainnya	0,13	0,05	-0,19	-0,01	-0,03
	JUMLAH	26,59	3,09	1,26	28,54	100

Sumber: Hasil Analisis 2017

4. Analisis Penentuan Sektor-Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas potensial dan unggulan di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu upaya yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang lebih agar dapat di capai produktivitas dan nilai tambah yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan Masyarakat. Dari ke 17 sektor yang ada di Kabupaten Enrekang dapat diidentifikasi/ditentukan sektor yang merupakan sektor unggulan, agak unggul, mundur dan agak mundur. Dalam menentukan sektor tersebut maka dilakukan dengan menentukan hasil dari nilai absolute dengan Analisis Shift Share masing-masing sektor

kemudian digunakan analisis Grafik sebagai mana pada tabel di bawah :

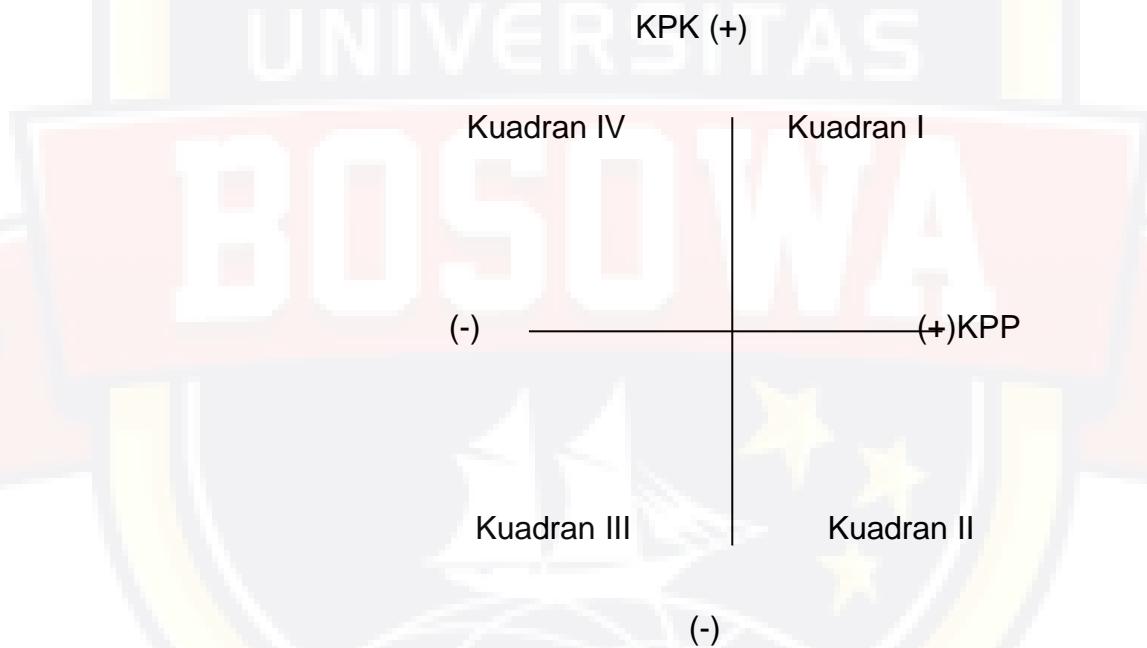
Tabel 4.19
Nilai Absolute Masing-Masing Sektor

No	Sektor Ekonomi	Nilai Absolute				%
		KPN	KPP	KPK	PN	
1	Pertanian	10,42	1,49	0,00	1,49	72,68
2	Pertambangan dan Penggalian	0,81	-0,69	1,16	0,47	22,92
3	Industri Pengolahan	1,82	0,26	-0,26	0,00	0,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03	0,05	2,43
5	Pengadaan Air	0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00
6	Konstruksi	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Perdagangan	2,58	1,11	0,37	1,48	72,19
8	Transportasi dan Pergudangan	0,24	0,03	0,07	0,10	4,87
9	Penyediaan Akomodasi	0,20	0,03	-0,03	0,00	0,00
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	0,16	0,31	0,47	22,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,67	-0,09	0,58	28,29
12	Real Estate	0,71	-0,10	0,10	0,00	0,00
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,49
14	Administrasi Pemerintahan	2,02	-2,31	0,00	-2,31	-112,68
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,07	0,00	0,07	3,41
16	Jasa Kesehatan	0,51	0,00	-0,15	-0,15	-7,31
17	Jasa lainnya	0,13	0,06	-0,19	-0,19	-9,27
	Jumlah	25,35	0,79	0,79	2,05	100

Sumber :Hasil analisis 2017

- **Analisis Grafik Shift Share**

Metode analisis *Grafik* merupakan bagian dari analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui sub sektor unggul, agak unggul, dan agak mundur serta sub sektor mundur. Identifikasi terhadap sub sektor tersebut dilihat dari nilai KPP dan nilai KPK. Lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut;



Ketentuan :

Kuadran I : Sektor unggul yaitu nilai KPP dan KPK positif

Kuadran II : Sektor agak mundur yaitu nilai KPK negatif dan KPP positif

Kuadran III: Sektor mundur yaitu nilai KPK negatif dan KPP negatif

Kuadran IV: Sektor agak unggul yaitu nilai KPP negatif dan KPK positif

Berdasarkan analisis Grafik tersebut diatas, maka sektor yang ada di Kabupaten Enrekang yang merupakan sektor unggulan dapat dilihat sebagaimana pada tabel :

Tabel 4.20
Sektor Unggul, agak unggul, mundur dan agak mundur

Sektor Unggulan Kuadran I	Sektor Agak Mundur Kuadran II	Sektor mundur Kuadran III	Sektor Agak Unggul Kuadran IV
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertanian, kehutanan, perikanan ➤ listrik dan gas ➤ perdagangan besar ➤ transportasi ➤ konstruksi ➤ komunikasi ➤ jasa Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ industri ➤ penyediaan akomodasi makan dan minum ➤ jasa keuangan ➤ jasa perusahaan ➤ jasa kesehatan ➤ jasa lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertambangan dan penggalian ➤ Pengadaan Air bersih ➤ Real taste ➤ Jasa Administrasi pemerintah

Sumber : hasil analisis 2017

5. Pergeseran Netto (Net Shif)

Pada tahap analisis Net Shif merupakan hasil penjabaran dari analisis *Shift Share* yaitu dengan menjumlahkan nilai KPP dan nilai KPK, sehingga didapat pergeseran netto. Nilai Pergeseran Netto menunjukkan suatu sektor maju atau mundur. Dari hasil analisis tersebut terdapat beberapa sektor kategori maju dan berpengaruh positif terhadap perkembangan kabupaten Kabupaten dan sektor yang mundur yang berpengaruh negatif terhadap perkembangan kabupaten dalam hal ini adalah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun Sektor yang maju adalah sektor Pertanian, sektor pertambangan, industri, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, Perdagangan besar, transportasi, Akomodasi, informasi komunikasi, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Terlihat dari nilai absolut, terdapat dua sektor maju yang tingkat perkembangan dan pengaruhnya terhadap daerah cukup baik yaitu sektor pertanian (72,68%), dan sektor perdagangan (72,19%). Untuk lebih jelasnya nilai PN (pergeseran netto) sebagaimana pada tabel:

Tabel 4.21

Pergeseran Netto Masing-Masing Sektor

No	Sektor Ekonomi	Absolute				%
		KPN	KPP	KPK	PN	
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	11,03	1,49	0,00	1,49	72,68
2	Pertambangan dan Penggalian	0,86	-0,69	1,15	0,46	22,92
3	Industri Pengolahan	1,93	0,26	-0,26	0,00	0,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,02	0,03	0,05	2,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00
6	Konstruksi	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	1,10	0,37	1,47	72,19
8	Transportasi dan Pergudangan	0,26	0,03	0,07	0,10	4,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	0,03	-0,03	0,00	0,00
10	Informasi dan Komunikasi	1,16	0,15	0,15	0,30	22,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,67	-0,09	0,58	28,29
12	Real Estate	0,71	-0,10	0,10	0,00	0,00
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,49
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	-2,29	0,00	-2,29	-112,68
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,07	0,00	0,07	3,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,51	0,00	-0,14	-0,14	-7,31
17	Jasa lainnya	0,13	0,05	-0,19	-0,14	-9,27
	Jumlah	26,59	3,09	1,26	2,05	100

Sumber : BPS kabupaten Enrekang tahun 2017 diolah

6. Analisis Penentuan Sektor-Sektor Strategis

Sektor strategis adalah sektor yang memiliki potensi untuk berkembang baik dimasa sekarang maupun pada masa yang akan datang, dimana sektor strategis dapat dinilai dari 4 (empat) variabel, yaitu kontribusinya terhadap kabupaten, memiliki pengaruh terhadap sektor lain dan sektor yang dapat meningkatkan ekspor. Lebih lanjut sektor-sektor strategis yang dimaksud adalah sebagaimana pada pembahasan berikut;

a. Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten

Berdasarkan hasil analisis Shift Share, nilai PN (net shift) menunjukkan bahwa dari 17 sektor yang ada di Kabupaten Enrekang terdapat 8 (delapan) sektor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kabupaten Enrekang di antara sektor tersebut adalah: sektor Pertanian (72,68%), sektor pertambangan (22,92%), sektor pengadaan listrik dan gas (2,43%), sektor perdagangan (72,19%), sektor transportasi dan pergudangan (4,87%), sektor komunikasi (22,92%), sektor jasa keuangan (28,29%) dan sektor jasa pendidikan (3,41%) Dari ke delapan sektor tersebut merupakan sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap PDRB Kabupaten Enrekang, sedangkan sektor yang kurang maju dan berpengaruh Negatif terhadap pendapatan kabupaten yaitu terdapat 4 sektor. adapun sektor tersebut adalah:

sektor jasa perusahaan (-,49%), sektor Administrasi Pemerintah (-112,68%), sektor jasa kesehatan (-7,31%), dan sektor jasa lainnya (-9,27%) dari ke empat sektor tersebut berpengaruh negatif terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Enrekang. Dan ada 5 sektor yang tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan kabupaten yaitu : sektor industri, sektor pengadaan air, sektor konstruksi, sektor akomodasi, dan sektor real estate, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel di bawah :

Tabel 4.22
Hasil Analisis KPN, KPP, KPK dan PN (Net Shif) Setiap
Sektor Di Kabupaten Enrekang

No	Sektor Ekonomi	Absolute				%
		KPN	KPP	KPK	PN	
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	10,42	1,49	0,00	1,49	72,68
2	Pertambangan dan Penggalian	0,81	-0,69	1,16	0,47	22,92
3	Industri Pengolahan	1,82	0,26	-0,26	0,00	0,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03	0,05	2,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00
6	Konstruksi	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,58	1,11	0,37	1,48	72,19
8	Transportasi dan Pergudangan	0,24	0,03	0,07	0,10	4,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,03	-0,03	0,00	0,00
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	0,16	0,31	0,47	22,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,67	-0,09	0,58	28,29

12	Real Estate	0,71	-0,10	0,10	0,00	0,00
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,49
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	-2,31	0,00	-2,31	-112,68
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,07	0,00	0,07	3,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,51	0,00	-0,15	-0,15	-7,31
17	Jasa lainnya	0,13	0,06	-0,19	-0,19	-9,27
	Jumlah	25,35	0,79	0,79	2,05	100

Sumber : hasil analisis 2017

b. Penyediaan Lapangan kerja

Penyediaan lapangan kerja pada sektor kegiatan yang mempunyai tenaga kerja yang relatif banyak dan memiliki prospek untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak pula. Dari semua sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap PDRB, apabila dilihat dari peluang tenaga kerja, maka sektor pertanian, sektor perdagangan, pertambangan, pengadaan air bersih, real estate dan administrasi pemerintah, merupakan sektor strategis membuka peluang tenaga kerja. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor mundur sekarang ini tetapi tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang akan menjadi sektor yang maju berpengaruh positif terhadap pendapatan kabupaten Enrekang. Dengan adanya sektor sektor tersebut, dimasa yang akan datang dapat menambah jumlah tenaga kerja sehingga dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk bekerja, sehingga mengurangi

tingkat pengangguran dan memberikan masukan terhadap PDRB Kabupaten Enrekang.

c. Berpengaruh Terhadap Perkembangan Sektor Lain

Sektor yang mempunyai keterkaitan kuat dengan pengembangan sektor lain yang dimaksud adalah sektor kegiatan apabila dikembangkan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan sektor kegiatan lain. Sebagai contoh adalah sektor pertanian dapat memberikan pengaruh terhadap sektor angkutan yaitu dengan adanya hasil-hasil bumi untuk diangkut, sektor industri dengan sektor pertanian dan perdagangan secara tidak langsung saling terkait oleh karena adanya kegiatan-kegiatan yang saling mendukung, sektor industri tidak dapat memproduksi tanpa adanya bahan baku untuk diolah, kemudian diperdagangkan.

Pengembangan sektor pertanian akan memperoleh dampak yang lebih luas terutama terhadap berkembangnya sektor industri pengolahan yang dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Sektor industri dinilai prospektif untuk dikembangkan dengan asumsi tersedianya sumber bahan baku yang potensial, terutama industri pengolahan sektor pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan). Peluang perkembangan sektor ini juga cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional propinsi. Bahkan dalam jangka panjang, pengembangan

sektor pertanian yang mendukung berkembangnya agroindustri akan dapat memperkuat perekonomian Kabupaten Enrekang.

Selain itu, secara matematik dari hasil analisis nilai absolut yaitu pada tabel 4.18 terlihat ada beberapa sektor yang dapat mempengaruhi perkembangan terhadap sektor lain terutama sektor yang kurang maju atau sektor mundur. Adapun sektor yang dimaksud adalah *sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi* . Pengaruh sektor tersebut dapat dilihat dari tingkat masukan terhadap nilai perubahan pendapatan kabupaten (PEK) masing-masing sektor. Dengan demikian, nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor yang kurang maju atau mundur dengan melakukan peningkatan daya dukung terhadap sektor-sektor tersebut, sehingga sektor tersebut dapat maju.

d. Sektor yang Potensial Meningkatkan Ekspor

Sektor yang potensial meningkatkan ekspor yaitu sektor yang dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor baik ditinjau dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu salah satu tujuan terhadap peningkatan kegiatan ekspor adalah akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan berpengaruh terhadap Pendapatan Regional Bruto (PDRB).

Sektor-sektor kegiatan yang memiliki potensi untuk diekspor atau dapat meningkatkan nilai eksportnya, secara matematik dapat

diketahui melalui pendekatan analisis LQ (Location Question) utamanya pada sektor-sektor primer, seperti sektor pertanian. Pada sektor pertanian memiliki sub-sub sektor diantaranya adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pendekatan analisis LQ dimaksudkan untuk mengetahui apakah sektor primer tersebut dapat diekspor atau hanya cukup untuk konsumsi lokal saja atau perlu adanya masukan dan impor dari daerah lain.

Dari pendekatan analisis LQ terdapat beberapa sub sektor yang mampu untuk diekspor. Adapun sub sektor yang memiliki kecenderungan untuk ekspor yaitu sub sektor Perkebunan dengan Nilai LQ 2,02, sub sektor tanaman pangan dengan nilai LQ 1,26, sub sektor peternakan dengan nilai LQ 1,15, sedangkan sub sektor Holtikultura, perikanan dan kehutanan belum mampu diekspor tetapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam wilayah Kabupaten Enrekang. Untuk lebih jelas nilai LQ masing-masing sub sektor dapat dilihat pada tabel:

Tabel.4.23**Nilai LQ Masing-Masing Sub Sektor Pertanian**

NO	Kecamatan	Nilai Location Quotion (LQ)					
		Pangan	Holtikultura	Perkebunan	Peternakan	perikanan	kehutanan
1	Maiwa	2,71	0,01	1,04	0,70	0,29	8,64
2	Bungin	1,04	0,46	6,17	1,10	0,93	-
3	Enrekang	2,58	0,04	1,57	0,95	0,93	-
4	Cendana	2,66	0,01	1,50	0,61	1,84	-
5	Baraka	0,54	1,33	0,25	0,23	0,51	-
6	Buntu Batu	1,55	0,33	6,49	1,61	0,41	-
7	Anggeraja	0,18	1,55	0,10	0,16	0,33	-
8	Malua	1,84	0,39	2,45	2,33	1,22	0,27
9	Alla	0,20	1,44	1,10	1,45	1,63	-
10	Curio	1,75	0,46	1,78	2,94	1,23	1,17
11	Masalle	0,08	1,54	0,82	0,79	0,05	-
12	Baroko	0,03	1,53	1,06	1,00	0,66	-
Rata-Rata LQ	Nilai	1,26	0,75	2,02	1,15	0,83	0,84

Sumber : hasil analisis 2018

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, bahwa dari ke tujuh belas sektor kegiatan yang ada di Kabupaten Enrekang terdapat 6 (enam) sektor yang merupakan sektor strategis yang apabila di kembangkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan Daerah. Adapun sektor strategis berpotensi untuk di kembangkan di kabupaten Enrekang yang di dukung oleh tersedianya sumberdaya yang dimiliki adalah sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, penyediaan air bersih, real estate, dan administrasi pemerintah. Adapun sektor strategis sebagaimana pada tabel di bawah :

Tabel 4.24

Sektor-Sektor Strategis di Kabupaten Enrekang

No	Sektor
(1)	(2)
1	Pertanian
2	Pertambangan dan penggalian
3	Perdagangan
4	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
5	Real estate
6	Administrasi pemerintah

Sumber: Hasil Analisis,2018

7. Faktor yang mendukung sektor unggulan

Sektor yang paling unggul di antara ke 17 sektor di Kabupaten Enrekang adalah sektor pertanian, Sektor pertanian sangat penting peranannya dalam perekonomian di Kabupaten Enrekang, Karena sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB dengan nilai Kontribusi sebesar 72,68%. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian sebagian besar penduduk di wilayah ini masih mengandalkan sektor pertanian.

Faktor yang mendukung sektor pertanian ini lebih unggul dari pada sektor lainnya di Kabupaten Enrekang ini dapat dilihat dari kondisi geografis yang dimana didominasi oleh wilayah daratan yang memiliki ragam potensi wilayah terbentang luas, sehingga masyarakat setempat sangat memanfaatkan sumber daya alam untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, luas potensi pengembangan pertanian di Kabupaten Enrekang mencapai 68.331 Ha, Dan yang termanfaatkan sebesar 55.507 Ha. Keberhasilan sektor pertanian mengangkat perekonomian masyarakat didukung oleh ketersediaan lahan yang subur memungkinkan pengembangan berbagai komoditas, baik komoditas tanaman pangan dan hortikultura maupun berbagai komoditas lainnya.

Kondisi sektor pertanian yang menonjol dalam struktur ekonomi kabupaten Enrekang sangat relevan apabila sektor pertanian dikembangkan sebagai sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi daerah. Dalam RTRW Kabupaten Enrekang Tentang Penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan Kabupaten Enrekang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam

melalui inovasi dan pengembangan sumber daya manusia menuju Kabupaten Enrekang yang maju dan mandiri, dan ditetapkannya visi kabupaten Enrekang yaitu Terwujudnya Enrekang Maju Aman Sejahtera (EMAS) menuju daerah agropolitan berwawasan lingkungan..

Faktor lain yang mendukung sektor pertanian menjadi sektor unggulan ini ialah pada Kecamatan Alla tepatnya di Desa sumillan terdapat pasar Agribisnis. Semua hasil pertanian dan perkebunan akan di distribusikan langsung ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang melalui pasar Agribisnis yang ada di desa Sumillan, bukan hanya di Kabupaten Enrekang melaikan daerah daerah luar yang ada di Indonesia seperti Kalimantan, kendari, luwu, busgis, Makassar, jenepono, Bantaeng Surako, Toraja, palopo dan lain-lain. Hasil pertanian yang masuk ke pasar angribisnis melalui pedagang pengumpul, dan semua hasil pertanian yang ada di Kabupaten Enrekang masuk di pasar agribisnis kemudian langsung di distribusikan keluar daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dalam menentukan sektor unggulan dan sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil analisis Grafik Shift Share, menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Enrekang yaitu sektor pertanian, listrik dan gas, perdagangan, transportasi, konstruksi dan jasa pendidikan.
2. Dari pendekatan analisis shift share menunjukkan bahwa besarnya kontribusi sektor unggulan pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten Enrekang yaitu, sektor Pertanian (72,68%), sektor listrik dan gas (2,3%), sektor perdagangan (72,68%), sektor transportasi (4,87%), sektor konstruksi (0,00%), dan sektor jasa pendidikan (3,41%).
3. Dari pendekatan analisis LQ terdapat beberapa sub sektor yang mampu untuk di ekspor yaitu sub sektor perkebunan dengan nilai LQ 2,02, sub sektor tanaman pangan LQ 1,26, dan sub sektor peternakan dengan nilai LQ 1,15, dilihat dari nilai LQ

sub –sub sektor tersebut dapat di ekspor keluar daerah Kabupaten Enrekang

B. Saran

1. Sebagai rekomendasi, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Enrekang dalam upaya meningkatkan PDRB agar lebih mengutamakan pengembangan sektor unggulan, sehingga dalam jangka pendek, menengah atau panjang dapat memberikan dampak yang tinggi pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang.
2. Penelitian ini masih terbatas pada tahapan menentukan sektor unggulan, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisis sub sektor unggulan bahkan sampai pada tahapan komoditi unggulan. Sehingga memudahkan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan komoditas melalui penerapan yang aplikatif pada penerapan kebijakan di masa yang mendatang.

Daftar Pustaka

Adisasmita Rahardjo, 2005, *Dasar Dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit PT Graha Ilmu

Adisasmita Raharjo, 2008, *Pengembangan Wilayah Konsep Dan Teori*. Penerbit Graha Ilmu

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Makassar: Graha Ilmu, 2006.

<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/1155/111>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3626/analiskomoditasunggulanregionalsektorpertaniandisulawesiselatantahun2000.pdf?sequence=1>

Sjafrizal, 2012, *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Penerbit Raja Grafindo Persada

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media

Statistik Povinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Tarigan Robinson, 2005, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi*. Penerbit PT Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. PT. Bumi Aksara:Jakarta

Tcahyati. B, *Arah Kebijakan Tata Ruang Nasional Dalam Menghadapi Fenomena Wilayah Mega Urban di Indonesia*, Jurnal PWK, ITB Bandung,1993.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Warpani. S, 1984.*Analisis Kota dan Daerah*,ITB : Jakarta

Pemerintah Kabupaten Enrekang. 2017. *Statistik Daerah Kabupaten Enrekang*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan

LAMPIRAN A

1. Data PDRB Propinsi Sulawesi-Selatan

Tabel. I.1
Data PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	2015	2016
(1)	(2)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan JasaPertanian - Tanaman Pangan - Tanaman Hortikultura - Perkebunan - Peternakan - Jasa Pertanian, dan Perburuan b. Kehutanan dan Penebangan Kayu c. Perikanan	54.071.396,49 35.800.236,64 18.272.015,73 3.109.347,92 10.830.885,40 2.664.103,19 923.884,40 181.296,18 18.089.863,68	58.438.329,21 38.595.462,92 19.785.246,84 3.314.375,46 11.600.397,30 2.902.137,18 993.306,06 174.485,43 19.668.380,86
2	Pertambangan dan Penggalian a. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi b. Pertambangan Batubara dan Lignit c. Pertambangan Bijih Logam d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	15.802.951,88 2.313.347,32 0,00 8.692.128,27 4.797.476,29	15.955.668,77 2.140.536,34 0,00 8.483.451,82 5.331.680,61
3	Industri Pengolahan a. Industri Batubara dan Pengilangan Migas - Industri Batu Bara - Pengilangan Migas b. Industri Makanan dan Minuman c. Pengolahan Tembakau d. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi e. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki f. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya g. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman h. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional i. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik j. Industri Barang Galian bukan Logam k. Industri Logam Dasar l. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik m. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL n. Industri Alat Angkutan o. Industri Furnitur p. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	35.555.679,63 0,00 0,00 0,00 16.712.881,63 42.029,21 30.339,02 175.386,42 478.474,75 303.379,47 24.547,98 98.124,33 16.470.950,58 209.349,12 891.195,93 0,00 44.907,60 31.942,72 42.170,88	3 38.454.807,25 0,00 0,00 0,00 18.188.835,94 38.878,17 31.789,59 191.601,13 537.445,63 287.709,46 25.759,51 99.757,09 17.774.036,07 224.267,43 937.264,34 0,00 39.564,54 32.936,16 44.962,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas a. Ketenagalistrikan	230.439,29 223.758,98	256.978,89 249.993,47

	b. Pengadaan Gas dan Produksi Es	6.680,31	6.985,42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	302.864,34	319.333,38
6	Konstruksi	29.967.277,25	31.989.277,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34.915.413,25	38.360.682,17
	a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	7.493.735,16	7.966.060,85
	b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	27.421.678,09	30.394.621,32
8	Transportasi dan Pergudangan	9.142.461,79	9.858.870,32
	a. Angkutan Rel	0,00	0,00
	b. Angkutan Darat	3.580.358,59	3.685.588,92
	c. Angkutan Laut	718.083,58	691.885,47
	d. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	283.451,99	305.598,51
	e. Angkutan Udara	3.201.882,87	3.732.507,02
	f. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.358.684,76	1.443.290,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.370.055,77	3.655.581,42
	a. Penyediaan Akomodasi	667.324,43	747.492,02
	b. Penyediaan Makan Minum	2.702.731,34	2.908.089,40
10	Informasi dan Komunikasi	15.712.599,77	16.989.305,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.662.536,51	9.842.958,71
	a. Jasa Perantara Keuangan	5.913.158,46	6.860.375,33
	b. Asuransi dan Dana Pensiun	265.082,23	283.270,15
	c. Jasa Keuangan Lainnya	2.450.300,57	2.663.126,09
	d. Jasa Penunjang Keuangan	33.995,24	36.187,13
12	Real Estate	9.197.417,20	9.783.666,67
13	Jasa Perusahaan	1.059.533,29	1.142.988,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.336.650,91	11.216.999,76
15	Jasa Pendidikan	13.378.000,09	14.295.972,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.845.172,01	5.254.628,77
17	Jasa lainnya	3.207.834,73	3.522.499,25
	PDRB	250.758.284,22	269.338.548,61

Sumber: Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2017

2. Data PDRB Kabupaten Enrekang

Tabel. I.2

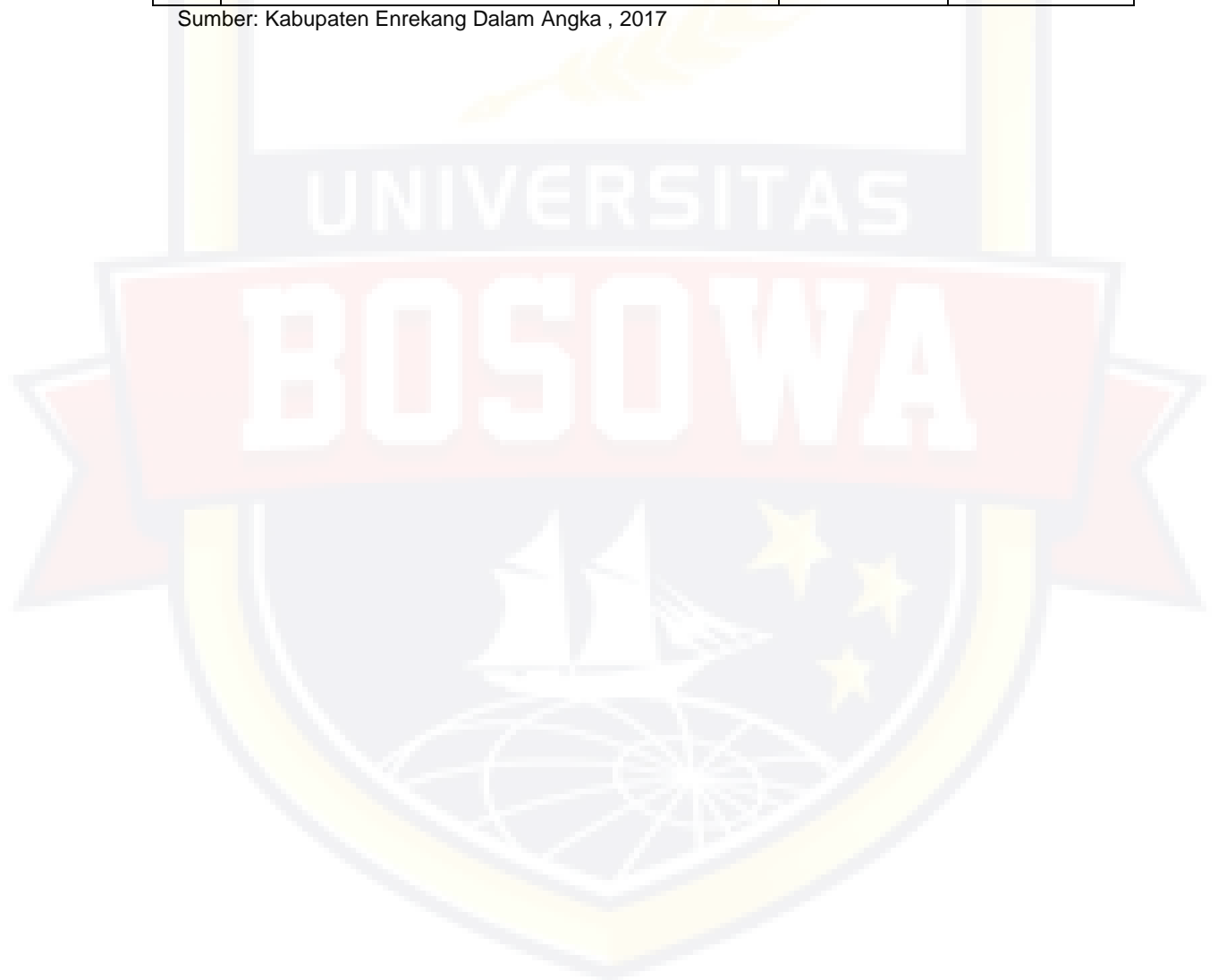
Data PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2015	2016
(1)	(2)	(6)	(7)

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan JasaPertanian - Tanaman Pangan - Tanaman Hortikultura - Perkebunan - Peternakan - Jasa Pertanian, dan Perburuan b. Kehutanan dan Penebangan Kayu c. Perikanan	1.487.482,32 1.458.112,21 322.943,07 716.473,67 256.549,65 96.046,04 66.099,78 2.713,25 26.656,85	1.606.911,31 1.575.417,09 348.746,76 776.921,92 274.492,00 106.060,39 69.196,02 2.639,64 28.854,58
2	Pertambangan dan Penggalian a. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi b. Pertambangan Batubara dan Lignit c. Pertambangan Bijih Logam d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	115.616,32 0,00 0,00 0,00 115.616,32	127.884,22 0,00 0,00 0,00 127.884,22
3	Industri Pengolahan a. Industri Batubara dan Pengilangan Migas - Industri Batu Bara - Pengilangan Migas b. Industri Makanan dan Minuman c. Pengolahan Tembakau d. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi e. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki f. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya g. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman h. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional i. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik j. Industri Barang Galian bukan Logam k. Industri Logam Dasar l. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik m. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL n. Industri Alat Angkutan o. Industri Furnitur p. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	260.078,97 0,00 0,00 0,00 241.447,36 0,00 2.151,66 17,68 5.694,67 2.293,25 1.568,35 0,00 2.032,01 0,00 2.320,18 0,00 18,96 771,47 1.763,36	279.375,45 0,00 0,00 0,00 259.645,26 0,00 2.243,68 18,80 6.236,28 2.334,77 1.590,41 0,00 2.163,02 0,00 2.463,35 0,00 19,51 831,27 1.829,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas a. Ketenagalistrikan b. Pengadaan Gas dan Produksi Es	5.302,79 5.199,78 103,01	5.815,21 5.705,61 109,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.833,48	4.135,83
6	Konstruksi	508.939,10	545.193,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	369.982,81 79.030,30 290.952,50	409.719,06 82.346,29 327.372,77
8	Transportasi dan Pergudangan a. ngkutan Rel b. Angkutan Darat c. Angkutan Laut d. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan e. Angkutan Udara f. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	34.926,32 0,00 34.727,12 0,00 0,00 0,00 199,20	38.355,78 0,00 38.153,84 0,00 0,00 0,00 201,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum a. Penyediaan Akomodasi b. Penyediaan Makan Minum	28.316,88 1.354,35 26.962,53	30.356,12 1.372,24 28.983,87
10	Informasi dan Komunikasi	156.047,35	172.605,11

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	95.878,03	108.737,09
	a. Jasa Perantara Keuangan	59.487,04	68.948,76
	b. Asuransi dan Dana Pensiun	6.455,76	6.898,71
	c. Jasa Keuangan Lainnya	29.935,22	32.889,62
	d. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00
12	Real Estate	101.993,11	108.873,29
13	Jasa Perusahaan	967,37	1.000,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	287.103,94	285.139,35
15	Jasa Pendidikan	74.120,13	79.117,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.990,30	77.211,90
17	Jasa lainnya	19.127,10	19.181,88
	PDRB	3.622.706,31	3.899.612,41

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka , 2017



3. Proses Analisis
A. Analisis Penentuan

Tabel I.3

Data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang atas dasar harga konstan tahun 2015-2016

NO	Usaha	Sulawesi Selatan		Kabupaten Enrekang	
		2015	2016	2015	2016
1	Pertanian	54.071.306,49	58.438.329,21	1.488.982,30	1.606.911,31
2	Pertambangan dan Penggalian	15.802.951,88	15.955.668,77	115.616,30	127.884,22
3	Industri Pengolahan	35.555.679,63	38.454.807,25	260.079	279.375,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	230.439,29	256.978,89	4.925	5.815,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	302.864,34	319.333,38	3.833,50	4.135,83
6	Konstruksi	29.967.277,25	31.989.277,59	508.939,10	545.193,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34.915.413,25	38.360.682,17	368.482,80	409.719,06
8	Transportasi dan Pergudangan	9.142.461,79	9.858.870,32	34.926,30	38.355,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.370.055,77	3.655.581,42	28.316,90	30.356,12
10	Informasi dan Komunikasi	15.712.599,77	16.989.305,62	156.047,30	172.605,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.662.536,51	9.842.958,71	95.878	108.737,09
12	Real Estate	9.197.417,20	9.783.666,67	101.993,10	108.873,28
13	Jasa Perusahaan	1.059.533,29	1.142.988,57	967,4	1.000,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.336.650,91	11.216.999,76	287.103,94	285.139,35
15	Jasa Pendidikan	13.378.000,09	14.295.972,24	74.120,30	79.177,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.845.172,01	5.254.628,77	72.990,30	77.211,90
17	Jasa lainnya	3.207.834,73	3.522.499,25	19.127,10	19.181,88

PDRB	250.758.284,22	269.338.548,61	3.622.706,00	3.899.612,41
Pertumbuhan PDRB kab/provinsi	3,57%		3,68%	

Sumber : BPS kabupaten Enrekang 2017

- Pertumbuhan PDRB Kabupaten = $\frac{3.899.612,41 - 3.622.706,00}{3.622.706,00 + 3.899.612,41} \times 100 \%$
 = 3,68 %
- Pertumbuhan PDRB Propinsi = $\frac{269.338.548,61 - 250.758.284,22}{269.338.548,61 + 250.758.284,22} \times 100 \%$
 = 3,57 %

A. Analisis Shift Share

$$PEK = KPN + KPP + KPK$$

Dimana :

PEK = Perubahan Pendapatan Kabupaten

KPN = Perubahan Pendapatan Nasional

KPP = Perubahan Pendapatan Propinsi

KPK = Perubahan Pendapatan Kabupaten

1. Perubahan Pendapatan Kabupaten

Perubahan Pendapatan Kabupaten Setiap Sektor

Di Kabupaten Enrekang Dalam Harga Konstan Tahun 2015-2016

No	Sektor Ekonomi	Data Kabupaten Enrekang		Perubahan	%
		PDRB 2015	PDRB 2016		
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.488.982,30	1.606.911,31	117.929,01	42,52
2	Pertambangan dan Penggalian	115.616,30	127.884,22	12.267,92	4,42
3	Industri Pengolahan	260.079	279.375,45	19.296,45	6,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.925	5.815,21	890,21	0,32
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.833,50	4.135,83	302,33	0,11
6	Konstruksi	508.939,10	545.193,11	36.254,01	13,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	368.482,80	409.719,06	41.236,26	14,86
8	Transportasi dan Pergudangan	34.926,30	38.355,78	3.429,48	1,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.316,90	30.356,12	2.039,22	0,73
10	Informasi dan Komunikasi	156.047,30	172.605,11	16.557,81	5,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	95.878	108.737,09	12.859,09	4,65
12	Real Estate	101.993,10	108.873,28	6.880,18	2,49

13	Jasa Perusahaan	967,4	1.000,26	32,86	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	287.103,94	285.139,35	-1.964,59	-0,07
15	Jasa Pendidikan	74.120,30	79.177,43	5.057,13	1,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.990,30	77.211,90	4.221,60	1,52
17	Jasa lainnya	19.127,10	19.181,88	54,78	0,01
PDRB		3.622.706,31	3.899.612,41	277.343,75	100

Sumber : BPS kabupaten Enrekang diolah

2. Mencari Nilai KPN

1 Sektor Pertanian

$$= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 = 0,07$$

2 Sektor Pertambangan

$$= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 = 0,07$$

3 Sektor Industri

$$\frac{= \underline{269.338.548,61} - 1}{250.758.284,22} = 0,07$$

4 Sektor Listrik dan gas

$$\frac{= \underline{269.338.548,61} - 1}{250.758.284,22} = 0,07$$

5 Sektor pengadaan air

$$\frac{= \underline{269.338.548,61} - 1}{250.758.284,22} = 0,07$$

6 Sektor konstruksi

$$\frac{= \underline{269.338.548,61} - 1}{250.758.284,22} = 0,07$$

7 Sektor perdagangan

$$\frac{= \underline{269.338.548,61} - 1}{250.758.284,22} = 0,07$$

8 Sektor transportasi dan pergudangan

$$\frac{= \underline{269.338.548,61} - 1}{250.758.284,22} = 0,07$$

9 Sektor penyediaan akomodasi

$$\frac{= \underline{269.338.548,61} - 1}{250.758.284,22} = 0,07$$

10 Sektor informasi dan komunikasi

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

11 Sektor jasa keuangan

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

12 Sektor Jasa perusahaan

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

13 Sektor administrasi pemerintah

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

14 Sektor Jasa pendidikan

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

15 Sektor Jasa kesehatan

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

16 Sektor real estate

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

17 Sektor Jasa lainnya

$$\begin{aligned} &= \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} - 1 &&= 0,07 \end{aligned}$$

3. Mencari Nilai KPP

1 Sektor Pertanian

$$\text{a. } \frac{58.438.329,21}{54.071.306,49} = 1,08$$

$$\text{b. } \frac{269.338.548,61}{250.758.284,22} = 1,07$$

$$\text{c. } 1,08 - 1,07 = 0,01$$

2 Sektor Pertambangan

$$\text{a. } \frac{15.955.668,77}{15.802.951,88} = 1,01$$

$$\text{b. } 1,01 - 1,07 = -0,06$$

3 Sektor Industri

$$\text{a. } \frac{38.454.807,25}{35.555.679,63} = 1,08$$

$$\text{b. } 1,08 - 1,07 = 0,01$$

4 Sektor Listrik dan gas

$$\text{a. } \frac{256.978,89}{230.439,29} = 1,12$$

$$\text{b. } 1,12 - 1,07 = 0,05$$

5 Sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah

$$\text{a. } \frac{319.333,38}{302.864,34} = 1,05$$

$$b. \quad 1,05 - 1,07 = -0,02$$

6 Sektor konstruksi

$$a. \quad \frac{31.989.277,59}{29.967.277,25} = 1,07$$

$$b. \quad 1,07 - 1,07 = 0,00$$

7 Sektor perdagangan

$$a. \quad \frac{38.360.682,17}{34.915.413,25} = 1,10$$

$$b. \quad 1,10 - 1,07 = 0,03$$

8 Sektor transportasi dan pergudangan

$$a. \quad \frac{9.858.870,32}{9.142.461,79} = 1,08$$

$$b. \quad 1,08 - 1,07 = 0,01$$

9 Sektor penyediaan akomodasi

$$a. \quad \frac{3.655.581,42}{3.370.055,77} = 1,08$$

$$b. \quad 1,08 - 1,07 = 0,01$$

10 Sektor informasi, komunikasi

$$a. \quad \frac{16.989.305,62}{15.712.599,77} = 1,08$$

$$b. \quad 1,08 - 1,07 = 0,01$$

11 Sektor jasa keuangan

$$a. \quad \frac{9.842.958,71}{8.662.536,51} = 1,14$$

$$b. \quad 1,14 - 1,07 = 0,07$$

12 Sektor Real estate

$$a. \quad \frac{9.783.666,67}{9.197.417,20} = 1,06$$

$$b. \quad 1,06 - 1,07 = -0,01$$

13 Sektor jasa perusahaan

$$a. \quad \frac{1.142.988,57}{1.059.533,29} = 1,08$$

$$b. \quad 1,08 - 1,07 = 0,01$$

14 Sektor Administrasi pemerintahan

$$a. \quad \frac{11.216.999,76}{11.336.650,91} = 0,99$$

$$b. \quad 0,99 - 1,07 = -0,08$$

15 Sektor jasa kesehatan

$$a. \quad \frac{5.254.628,77}{4.845.172,01} = 1,08$$

$$b. \quad 1,08 - 1,07 = 0,01$$

16 Sektor jasa pendidikan

a. $\frac{14.295.972,24}{13.378.000,09} = 1,07$

b. $1,07 - 1,07 = 0,00$

17 Sektor jasa lainnya

a. $\frac{3.522.499,25}{3.207.834,73} = 1,10$

b. $1,10 - 1,07 = 0,03$

4. Mencari Nilai KPK

1 Sektor Pertanian

a. $\frac{1.606.911,31}{1.488.982,30} = 1,08$

b. $1,08 - 1,08 = 0,00$

2

Sektor Pertambangan

a. $\frac{127.884,22}{115.616,30} = 1,11$

b. $1,11 - 1,01 = 0,10$

3 Sektor Industri

a. $\frac{279.375,45}{279.375,45} = 1,07$

260.079

b. $1,07 - 1,08 = -0,01$

4 Sektor Listrik dan gas

a. $\frac{5.815,21}{4.925} = 1,18$

b. $1,18 - 1,12 = 0,06$

5 Sektor pengadaan air

a. $\frac{4.135,83}{3.833,50} = 1,08$

b. $1,08 - 1,05 = 0,03$

6 Sektor konstruksi

a. $\frac{545.193,11}{508.939,10} = 1,07$

b. $1,07 - 1,07 = 0,00$

7 Sektor perdagangan

a. $\frac{409.719,06}{368.482,80} = 1,11$

b. $1,11 - 1,10 = 0,01$

8 Sektor transportasi dan pergudangan

a. $\frac{38.355,78}{34.926,30} = 1,10$

b. $1,10 - 1,08 = 0,02$

9 Sektor penyediaan akomodasi

a. $\frac{30.356,12}{28.316,90} = 1,07$

b. $1,07 - 1,08 = -0,01$

10 Sektor informasi dan komunikasi

a. $\frac{172.605,11}{156.047,30} = 1,11$

b. $1,11 - 1,10 = 0,01$

11 Sektor jasa keuangan

a. $\frac{108.737,09}{95.878} = 1,13$

b. $1,13 - 1,14 = -0,01$

12 Sektor Real estate

a. $\frac{108.873,28}{101.993,10} = 1,07$

b. $1,07 - 1,06 = 0,01$

13 Sektor jasa perusahaan

a. $\frac{1.000,26}{967,4} = 1,03$

b. $1,03 - 1,08 = -0,05$

14 Sektor administrasi

pemerintah

a. $\frac{285.139,35}{287.103,94} = 0,99$

b. $0,99 - 0,99 = 0,00$

15 Sektor jasa pendidikan

a. $\frac{79.177,43}{74.120,30} = 1,07$

b. $1,07 - 1,08 = -0,01$

16 Sektor jasa kesehatan

a. $\frac{77.211,90}{72.990,30} = 1,06$

b. $1,06 - 1,07 = -0,01$

17 Sektor jasa lainnya

a. $\frac{19.181,88}{19.127,10} = 1,00$

b. $1,00 - 1,10 = -0,10$

Tabel. I.5

Hasil Analisis KPN, KPP, KPK dan PN (Net Shif) Setiap Sektor

Di Kabupaten Halsei Tahun 2017

No	Sektor	KPN	KPP	KPK	PN
1	2	3	4	5	
1	Pertanian	0,07	0,01	0,00	0,01
2	Pertambangan dan Penggalian	0,07	-0,06	0,10	0,04
3	Industri Pengolahan	0,07	0,01	-0,01	0,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,05	0,06	0,11
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	0,07	-0,02	0,03	0,01
6	Konstruksi	0,07	0,00	0,00	0,00
7	Perdagangan Besar	0,07	0,03	0,01	0,04
8	Transportasi dan Pergudangan	0,07	0,01	0,02	0,03
9	Penyediaan Akomodasi	0,07	0,01	-0,01	0,00
10	Informasi dan Komunikasi	0,07	0,01	0,01	0,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,07	0,07	-0,01	0,06
12	Real Estate	0,07	-0,01	0,01	0,00
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,01	-0,05	0,04
14	Administrasi Pemerintahan,	0,07	-0,08	0,00	-0,08
15	Jasa Pendidikan	0,07	0,01	0,00	0,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,00	-0,02	-0,02
17	Jasa lainnya	0,07	0,03	-0,10	-0,07
	PDRB	0,57	0,23	0,04	0,02

5. Mencari nilai Absolute
a. KPN Absolute

Tabel

Penentuan nilai KPN Absolute

No	Sektor	PDRB 2015	KPN	KPN Absolute
1	2	3	4	5
1	Pertanian	148,90	0,07	11,03
2	Pertambangan dan Penggalian	11,56	0,07	0,86
3	Industri Pengolahan	26,01	0,07	1,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,07	0,04
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	0,38	0,07	0,03
6	Konstruksi	50,89	0,07	3,77
7	Perdagangan Besar	36,85	0,07	2,73
8	Transportasi dan Pergudangan	3,49	0,07	0,26
9	Penyediaan Akomodasi	2,83	0,07	0,21
10	Informasi dan Komunikasi	15,60	0,07	1,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,59	0,07	0,67
12	Real Estate	10,20	0,07	0,71
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,07	0,01
14	Administrasi Pemerintahan,	28,82	0,07	2,02
15	Jasa Pendidikan	7,41	0,07	0,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,30	0,07	0,51
17	Jasa lainnya	1,91	0,07	0,13
PDRB			148,90	26,4

Sumber: hasil analisis 2017

b. KPP Absolut

Tabel

Penentuan KPP Absolute

No	Sektor	PDRB 2015	KPP	KPP Absolute
1	2	3	4	5
1	Pertanian	148,90	0,01	1,49
2	Pertambangan dan Penggalian	11,56	-0,06	-0,69
3	Industri Pengolahan	26,01	0,01	0,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,05	0,02
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	0,38	-0,02	-0,01
6	Konstruksi	50,89	0,00	0,00
7	Perdagangan Besar	36,85	0,03	1,10
8	Transportasi dan Pergudangan	3,49	0,01	0,03
9	Penyediaan Akomodasi	2,83	0,01	0,03
10	Informasi dan Komunikasi	15,60	0,01	0,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,59	0,07	0,67
12	Real Estate	10,20	-0,01	-0,10
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,01	0,01
14	Administrasi Pemerintahan,	28,71	-0,08	-2,29
15	Jasa Pendidikan	7,41	0,01	0,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,30	0,00	0,00
17	Jasa lainnya	1,91	0,03	0,05
PDRB				

Sumber: hasil analisis 2017

c. KPK Absolute

Tabel

Penentuan nilai KPK Absolute

No	Sektor	PDRB 2015	KPK	KPK Absolute
1	2	3	4	5
1	Pertanian	148,90	0,00	0,00
2	Pertambangan dan Penggalian	11,56	0,10	1,15
3	Industri Pengolahan	26,01	-0,01	-0,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,06	0,03
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	0,38	0,03	0,01
6	Konstruksi	50,89	0,00	0,00
7	Perdagangan Besar	36,85	0,01	0,37
8	Transportasi dan Pergudangan	3,49	0,02	0,07
9	Penyediaan Akomodasi	2,83	-0,01	-0,03
10	Informasi dan Komunikasi	15,60	0,01	0,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,59	-0,01	-0,09
12	Real Estate	10,20	0,01	0,10
13	Jasa Perusahaan	0,10	-0,05	-0,01
14	Administrasi Pemerintahan,	28,71	0,00	0,00
15	Jasa Pendidikan	7,41	0,00	0,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,30	-0,02	-0,14
17	Jasa lainnya	1,91	-0,10	-0,19
PDRB				

Sumber: hasil analisis 2017

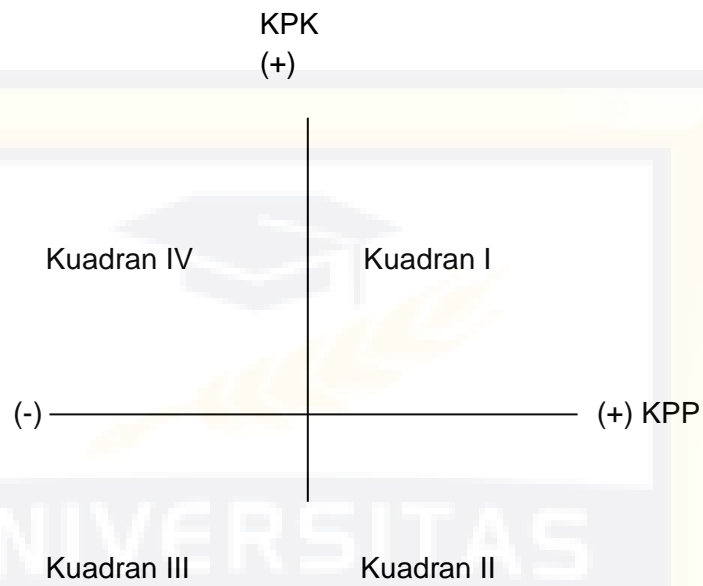
6. Nilai Absolute Masing-Masing Sektor

Tabel
Nilai absolute masing-masing sektor

No	Sektor	KPN	KPP	KPK	PEK
1	2	3	4	5	
1	Pertanian	11,03	1,49	0,00	12,52
2	Pertambangan dan Penggalian	0,86	-0,69	1,15	1,32
3	Industri Pengolahan	1,93	0,26	-0,26	1,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,02	0,03	0,09
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	0,03	-0,01	0,01	0,03
6	Konstruksi	3,77	0,00	0,00	3,77
7	Perdagangan Besar	2,73	1,10	0,37	4,20
8	Transportasi dan Pergudangan	0,26	0,03	0,07	0,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	0,03	-0,03	0,21
10	Informasi dan Komunikasi	1,16	0,15	0,15	1,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,67	-0,09	1,25
12	Real Estate	0,71	-0,10	0,10	0,71
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	-0,01	0,01
14	Administrasi Pemerintahan,	2,02	-2,29	0,00	-0,27
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,07	0,00	0,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,51	0,00	-0,14	0,37
17	Jasa lainnya	0,13	0,05	-0,19	-0,01
PDRB		26,59	3,09	1,26	28,54

Sumber: hasil analisis 2017

7. Analisis Grafik



Keterangan:

Kuadran I = Sektor unggul yaitu nilai KPK dan KPK positif

Kuadran II = Sektor agak mundur yaitu nilai KPK negatif dan KPP positif

Kuadran III = Sektor mundur yaitu nilai KPK dan KPP negatif

Kuadran IV = Sektor agak unggul yaitu nilai KPK Positif dan KPP negatif

Kesimpulan:

1. Sektor Pertanian
Sektor pertanian berada di kuadran I, sehingga sektor pertanian merupakan sektor Unggul

2. Sektor Pertambangan dan penggalian

Sektor Pertambangan berada di kuadran IV, sehingga sektor tersebut merupakan sektor agak unggul

3. Sektor Industri pengolahan

Sektor Industri merupakan sektor yang berada di kuadran II, sehingga sektor tersebut merupakan sektor agak mundur

4. Sektor Listrik & Gas

Sektor tersebut berada di kuadran I, sehingga sektor tersebut merupakan sektor unggul

5. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah

Sektor bangunan berada di kuadran IV, sehingga sektor tersebut merupakan sektor agak unggul

6. Sektor Konstruksi

Sektor perdagangan berada di kuadran I, sehingga sektor tersebut merupakan sektor unggul

7. Sektor perdagangan Besar

Sektor nagkutan berada di kuadran I, sehingga sektor merupakan sektor Unggul

8. Sektor transportasi dan pergudangan

Sektor keuangan berada di kuadran I, sehingga sektor tersebut merupakan unggul

9. Sektor penyediaan akomodasi

Sektor jasa-jasa berada di kuadran II, sektor tersebut merupakan sektor agak mundur

10. Sektor informasi dan komunikasi

Sektor jasa-jasa berada di kuadran I, sektor tersebut merupakan sektor unggul

11. Sektor jasa keuangan dan Asuransi

Sektor jasa-jasa berada di kuadran II, sektor tersebut merupakan sektor agak mundur

12. Sektor Real Estate

Sektor jasa-jasa berada di kuadran IV, sektor tersebut merupakan sector agak unggul

13. Sektor Jasa Perusahaan

Sektor jasa-jasa berada di kuadran II, sektor tersebut merupakan sektor agak mundur

14. Sektor Administrasi Pemerintahan,

Sektor jasa-jasa berada di kuadran IV, sektor tersebut merupakan sector agak unggul

15. Sektor Jasa Pendidikan

Sektor jasa-jasa berada di kuadran I, sektor tersebut merupakan sektor unggul

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sektor jasa-jasa berada di kuadran II, sektor tersebut merupakan sektor agak mundur

17. Sektor Jasa lainnya

Sektor jasa-jasa berada di kuadran II, sektor tersebut merupakan sektor Agak mundur

LAMPIRAN B

**Tabel hasil produksi sub sektor perkecamatan di Kabupaten Enrekang (ton)
2016**

NO	Kecamatan	Pangan	holtikultura	perkebunan	Peternakan	perikanan	kehutanan	jumlah
1	Maiwa	40361,14	52,5	1555,1	435,86	20,96	23,00	42634,56
2	Bungin	3090,1	1774,5	1363,7	102,1	10,3	-	6340,7
3	Enrekang	30686,76	894,3	1866,7	472,4	55,42	-	33975,58
4	Cendana	15713,5	60	881,5	151,8	54,2	-	16861
5	Baraka	15628,63	65886,5	735,6	287,5	74,44	-	82612,67
6	Buntu Batu	4939,32	1793,1	2050,1	2140	6,81	-	9059,33
7	Anggeraja	6613,75	94183	373,6	248,4	58,94	-	101477,7
8	Malua	5778,16	2092,5	765,6	305,2	19,06	0,154	8960,674
9	Alla	1211,8	14409,7	643,6	354,2	47,42	1,61	16666,72
10	Curio	13528	6131,5	1369,3	945,7	47,32	-	22023,43
11	Masalle	934,95	27983,3	870,9	349,0	25,82	-	30163,97
12	Baroko	282,2	22361,8	1351,7	352,8	28,05	-	24376,55
Jumlah		138.768,3	237.622,7	13.827,4	5790,76	874,93	24,764	396908,90

Sumber : (BPS kabupaten Enrekang 2017)

Pengunaan Rumus : $LQ = \frac{Si}{Ni} = \frac{Si}{S}$

$Si / N = Ni / N$

1. Kecamatan Maiwa

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{40361,1}{138768} / \frac{42634,6}{396909} \times 100 \% = 2,71$$

2. Holtikultura

$$LQ = \frac{52,5}{237623} / \frac{42634,56}{396908,9} \times 100 \% = 0,01$$

3. Perkebunan

$$\text{LQ} = \frac{1555,1 / 42634,56 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 1,04$$

4. peternakan

$$\text{LQ} = \frac{435,6 / 42634,56 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 0,70$$

5. Perikanan

$$\text{LQ} = \frac{20,96 / 42634,56 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 0,29$$

6. kehutanan

$$\text{LQ} = \frac{23 / 42634,56 \times 100 \%}{24,764 / 396908,9 \times 100\%} = 8,64$$

2. Kecamatan Bungin

1. Tanaman Pangan

$$\text{LQ} = \frac{3090,1 / 6340,7 \times 100\%}{138768 / 396908,9 \times 100\%} = 1,04$$

2. hortikultura

$$\text{LQ} = \frac{1774,5 / 6340,7 \times 100\%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 0,46$$

3. Perkebunan

$$\text{LQ} = \frac{1363,7 / 6340,7 \times 100\%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 6,17$$

4. peternakan

$$\text{LQ} = \frac{102,1 / 6340,7 \times 100\%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 1,10$$

5. Perikanan

$$\text{LQ} = \frac{10,3 / 6340,7 \times 100\%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 0,93$$

6. kehutanan

$$LQ = 0$$

3. Kecamatan Enrekang

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{30686,8 / 33975,6 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100 \%} = 2,58$$

2. Holtikultura

$$LQ = \frac{894,3 / 33975,6 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100 \%} = 0,04$$

3. Perkebunan

$$LQ = \frac{1866,7 / 33975,6 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100 \%} = 1,57$$

4. peternakan

$$LQ = \frac{472,4 / 33975,6 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100 \%} = 0,95$$

5. Perikanan

$$LQ = \frac{55,42 / 33975,6 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100 \%} = 0,93$$

6. kehutanan

$$LQ = 0$$

4. Kecamatan cendana

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{15713,5 / 16861 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100 \%} = 2,66$$

2. *Hortikultura*

$$\text{LQ} = \frac{60 / 16861 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 0,01$$

3. *Perkebunan*

$$\text{LQ} = \frac{881,5 / 16861 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 1,50$$

4. *peternakan*

$$\text{LQ} = \frac{151,8 / 16861 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 0,61$$

5. *Perikanan*

$$\text{LQ} = \frac{54,2 / 16861 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 1,84$$

6. *kehutanan*

$$\text{LQ} = 0$$

5. Kecamatan Baraka

1. *Tanaman Pangan*

$$\text{LQ} = \frac{15628,6 / 82612,7 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100\%} = 0,54$$

2. *Hortikultura*

$$\text{LQ} = \frac{65886,5 / 82612,7 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 1,33$$

3. *Perkebunan*

$$\text{LQ} = \frac{735,6 / 82612,7 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 0,25$$

4. *peternakan*

$$\text{LQ} = \frac{287,5 / 82612,7 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 0,23$$

5. *Perikanan*

$$LQ = \frac{74,44 / 42634,56 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 0,51$$

6. kehutanan

$$LQ = 0$$

6. Kecamatan Buntu Batu

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{4939,32 / 9059,33 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100\%} = 1,55$$

2. Holtikultura

$$LQ = \frac{1793,1 / 9059,33 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 0,33$$

3. Perkebunan

$$LQ = \frac{2050,1 / 9059,33 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 6,49$$

4. peternakan

$$LQ = \frac{214 / 9059,33 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 1,61$$

5. Perikanan

$$LQ = \frac{6,81 / 9059,33 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 0,41$$

6. kehutanan

$$LQ = 0$$

7. Kecamatan Anggeraja

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{6613,75 / 101478 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100\%} = 0,18$$

2. *Hortikultura*

$$\text{LQ} = \frac{94183 / 101478 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 1,55$$

3. *Perkebunan*

$$\text{LQ} = \frac{373,6 / 101478 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 0,10$$

4. *peternakan*

$$\text{LQ} = \frac{248,4 / 101478 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 0,16$$

5. *Perikanan*

$$\text{LQ} = \frac{58,94 / 101478 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 0,33$$

6. *kehutanan*

$$\text{LQ} = 0$$

8. Kecamatan Malua

1. *Tanaman Pangan*

$$\text{LQ} = \frac{5778,16 / 8960,67 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100\%} = 1,84$$

2. *Hortikultura*

$$\text{LQ} = \frac{2092 / 8960,67 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 0,39$$

3. *Perkebunan*

$$\text{LQ} = \frac{765,6 / 8960,67 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 2,45$$

4. *peternakan*

$$\text{LQ} = \frac{305,2 / 8960,67 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 2,33$$

5. Perikanan

$$LQ = \frac{19,06 / 8960,67 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 1,22$$

6. kehutanan

$$LQ = \frac{0,154 / 8960,67 \times 100 \%}{24,764 / 396908,9 \times 100\%} = 0,27$$

9. Kecamatan alla

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{1211,8 / 16666,7 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100\%} = 0,20$$

2. Holtikultura

$$LQ = \frac{14409,7 / 16666,7 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 1,44$$

3. Perkebunan

$$LQ = \frac{643,6 / 16666,7 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 1,10$$

4. peternakan

$$LQ = \frac{354,2 / 16666,7 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 1,45$$

5. Perikanan

$$LQ = \frac{47,42 / 16666,7 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 1,63$$

6. kehutanan

$$LQ = 0$$

10. Kecamatan Curio

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{13528 / 22023,4 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100\%} = 1,75$$

2. Holtikultura

$$LQ = \frac{6131,5 / 22023,4 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 0,46$$

3. Perkebunan

$$LQ = \frac{1369,3 / 22023,4 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 1,78$$

4. peternakan

$$LQ = \frac{945,7 / 22023,4 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 2,94$$

5. Perikanan

$$LQ = \frac{47,32 / 22023,4 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100\%} = 1,23$$

6. kehutanan

$$LQ = \frac{1,61 / 22023,4 \times 100 \%}{24,764 / 396908,9 \times 100\%} = 1,17$$

11. Kecamatan Masalle

1. Tanaman Pangan

$$LQ = \frac{934,85 / 30164 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100\%} = 0,08$$

2. Holtikultura

$$LQ = \frac{27983 / 30164 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100\%} = 1,54$$

3. Perkebunan

$$LQ = \frac{870,9 / 30164 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100\%} = 0,82$$

4. peternakan

$$LQ = \frac{349 / 30164 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100\%} = 0,79$$

5. Perikanan

$$\text{LQ} = \frac{25,82 / 30164 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100 \%} = 0,05$$

6. kehutanan

$$\text{LQ} = 0$$

12. Kecamatan Baroko

1. Tanaman Pangan

$$\text{LQ} = \frac{282,2 / 24376,6 \times 100 \%}{138768 / 3969099 \times 100 \%} = 0,03$$

2. Holtikultura

$$\text{LQ} = \frac{22361,8 / 24376,6 \times 100 \%}{237623 / 396908,9 \times 100 \%} = 1,53$$

3. Perkebunan

$$\text{LQ} = \frac{1351,7 / 24376,6 \times 100 \%}{13827,4 / 396908,9 \times 100 \%} = 1,06$$

4. peternakan

$$\text{LQ} = \frac{352,8 / 24376,6 \times 100 \%}{5790,76 / 396908,9 \times 100 \%} = 1,00$$

5. Perikanan

$$\text{LQ} = \frac{28,05 / 8960,67 \times 100 \%}{690,74 / 396908,9 \times 100 \%} = 0,66$$

6. kehutanan

$$\text{LQ} = 0$$

Nilai LQ Masing-Masing Sub Sektor Pertanian

N0	Kecamatan	Nilai Location Quotion (LQ)					
		Pangan	holtikultura	perkebunan	Peternakan	perikanan	kehutanan
1	Maiwa	2,71	0,01	1,04	0,70	0,29	8,64
2	Bungin	1,04	0,46	6,17	1,10	0,93	-
3	Enrekang	2,58	0,04	1,57	0,95	0,93	-
4	Cendana	2,66	0,01	1,50	0,61	1,84	-
5	Baraka	0,54	1,33	0,25	0,23	0,51	-
6	Buntu Batu	1,55	0,33	6,49	1,61	3,98	-
7	Anggeraja	0,18	1,55	0,10	0,16	0,33	-
8	Malua	1,84	0,39	2,45	2,33	1,22	0,27
9	Alla	0,20	1,44	1,10	1,45	1,63	-
10	Curio	1,75	0,46	1,78	2,94	1,23	1,17
11	Masalle	0,08	1,54	0,82	0,79	0,05	-
12	Baroko	0,03	1,53	1,06	1,00	0,66	-
Rata-Rata LQ	Nilai	1,26	0,75	2,02	1,15	0,83	0,84



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SRI ASTUTI DARMAN, lahir di Cakke, Kab. Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Juli 1995. Peneliti memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2001 di SDN 142 Kp, Baru, dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Anggeraja selesai pada tahun 2013 dan pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Bosowa Makassar dan selesai pada tahun 2018 di Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dengan gelar Sarjana Teknik (S.T)